



LKjIP 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
INSPEKTORAT DAERAH

JL. K.H. Samanhudi No.4 Telp. (0461) 3202096 Luwuk – Sulawesi Tengah
Email : itkabbanggai@yahoo.co.id

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banggai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Luwuk, 31 Maret 2023



IMRAN SUNI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19630822 199112 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan kinerja ini adalah merupakan tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama tahun 2022 yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022. Laporan kinerja ini sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP Kabupaten Banggai Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu: “Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banggai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni

masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2022. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2022 ini diharapkan dapat terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis selanjutnya, serta bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun yang akan datang.

Luwuk, Maret 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Banggai telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKjIP Kabupaten Banggai Tahun 2022 di susun sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2022 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk pernyataan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai yang di kelompokkan ke dalam pencapaian Misi Kabupaten Banggai yang terdiri dari 6 (enam) misi dengan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran yang harus dicapai, untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Di ketahui bahwa hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 10 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2022 menunjukkan bahwa, 6 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja lebih dari 100% bermakna Sangat Baik, 8 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja >75%-100% bermakna Baik, 1 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja 55%-75% bermakna Cukup, dan 2 indikator sasaran

diperoleh capaian kinerja <55% bermakna Kurang. Meskipun terdapat beberapa indikator masih belum berhasil, namun secara umum target indikator kinerja pada Tahun 2022 dikategorikan cukup berhasil dengan nilai capaian rata-ratanya yaitu sebesar 94,63% dari 15 indikator, 1 indikator dengan capaian tinggi dan 1 indikator dengan capaian inovatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai yang menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi Kabupaten Banggai.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
Daftar Grafik	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Gambaran Umum Daerah	I-1
1.3 Organisasi	I-8
1.4 Isu-Isu Strategis	I-12
1.5 Landasan Hukum	I-12
1.6 Sistematika Laporan	I-13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	II-10
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	II-27
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-31
2.5 Perjanjian Kinerja	II-32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Pengukuran Kinerja	III-1
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.3 Analisis Capaian Kinerja	III-4
3.4 Realisasi Anggaran	III-87
BAB IV PENUTUP	IV-1
L A M P I R A N	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banggai	I-3
1.2	Kondisi topografi kemiringan lereng di Kabupaten Banggai	I-5
1.3	Jumlah penduduk (ribu) Kab.Banggai Menurut Jenis Kelamin, 2022	I-7
1.4	Kondisi ASN berdasarkan golongan Tahun 2022	I-10
1.5	Kondisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022	I-11
1.6	Kondisi ASN berdasarkan kelompok umur Tahun 2022	I-11
2.1	Target Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Sesuai Periode RPJMD Tahun 2021 – 2026	II-5
2.2	Keterkaitan Pokok – Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Periode 2021-2026	II-7
2.3	Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah 2021-2026	II-8
2.4	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah 2021-2026	II-11
2.5	Arah kebijakan umum pembangunan daerah kabupaten banggai tahun 2021-2026	II-25
2.6	Indikator kinerja utama pemerintah kabupaten banggai	II-31
2.7	Perjanjian Kinerja tahun 2022	II-33
3.1	Interpretasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran	III-1
3.2	Pencapaian indikator kinerja	III-3
3.3	Rekap pencapaian indikator sasaran	III-4
3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	III-4
3.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020 – 2022	III-7
3.6	Data pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	III-12
3.7	Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja Tahun 2022 Kabupaten Banggai	III-15
3.8	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai, 2014-2022	III-17
3.9	Data kemiskinan kabupaten/kota tahun 2022 di Sulawesi Tengah	III-20
3.10	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah, 2020-2022	III-23
3.11	Program, Anggaran dan Realisasi Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	III-24
3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya	III-25

	Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	
3.13	Daftar eksportir SKA kabupaten Banggai tahun 2022	III-26
3.14	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2022 Yang Mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	III-26
3.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	III-27
3.16	Nilai Rata-Rata dan Status IDM Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2022	III-28
3.17	Status Perkembangan Desa di Kabupaten Banggai, 2022	III-29
3.18	Perbandingan IDM Banggai dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi tengah, 2022	III-29
3.19	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2022 Yang Mendukung sasaran Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	III-33
3.20	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	III-33
3.21	Capaian Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik tahun 2022	III-34
3.22	Infrastruktur dasar dan wilayah di kabupaten banggai, 2022	III-34
3.23	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2022 Yang Mendukung sasaran Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	III-37
3.24	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	III-39
3.25	Nilai IKD Kabupaten Banggai Berdasarkan 7 prioritas	III-40
3.26	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	III-41
3.27	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	III-42
3.28	Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Banggai	III-43
3.29	Jumlah Produksi Sektor Pertanian Tahun 2022	III-44
3.30	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap, 2021-2022	III-47
3.31	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya, 2021-2022	III-47
3.32	Budidaya Perikanan Tambak di Kabupaten Banggai, 2022	III-48
3.33	Pembenihan Perikanan di Kabupaten Banggai, 2022	III-48
3.34	Produksi daging ternak menurut jenis ternak, 2021-2022	III-49
3.35	Produksi Telur unggas di Kabupaten Banggai, 2021-2022	III-50

3.36	Potensi pertambangan mineral, minyak dan gas bumi di Kabupaten Banggai	III-51
3.37	Pola pangan harapan (PPH) ketersediaan kabupaten banggai, 22	III-53
3.38	Angka kecukupan energi dan protein kabupaten banggai, 2022	III-54
3.39	Cadangan pangan kabupaten banggai, 2022	III-54
3.40	Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	III-55
3.41	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat	III-56
3.42	Indeks kualitas air	III-57
3.43	Indeks kualitas udara	III-57
3.44	Indeks kualitas lahan/vegetasi hutan	III-57
3.45	Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten banggai, 2022	III-57
3.46	Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat	III-59
3.47	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	III-60
3.48	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Banggai Tahun 2022	III-61
3.49	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang tersedia pada Hotel Berbintang dan non bintang, penginapan, home stay, losmen, cottage, guest house, wisma di Kabupaten Banggai Tahun 2022	III-62
3.50	Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2019-2022	III-64
3.51	Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	III-65
3.52	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	III-65
3.53	Komunitas seni pertunjukkan Kabupaten Banggai Tahun 2022	III-66
3.54	Aset Cagar Budaya Kabupaten Banggai	III-68
3.55	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2022	III-69
3.56	Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta	III-70

	Moderasi Beragama	
3.57	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	III-70
3.58	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2022	III-72
3.59	Hasil antara area perubahan pemerintah kabupaten banggai, 2021-2022	III-73
3.60	Komponen Hasil tahun 2022 pemerintah kabupaten banggai	III-75
3.61	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Banggai Tahun 2022	III-80
3.62	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	III-83
3.63	Tingkat Efisiensi dan efektifitas Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2022	III-85
3.64	Realisasi Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2022	III-87
3.65	Pendapatan Pajak Daerah	III-89
3.66	Pendapatan retribusi daerah	III-90
3.67	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022	III-91
3.68	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-92
3.69	Pendapatan dana Kapitasi	III-92
3.70	Pendapatan Transfer	III-93
3.71	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	III-94
3.72	Realisasi Belanja Daerah Per 31 Desember 2022	III-95
3.73	Belanja Pegawai	III-96
3.74	Belanja barang dan jasa	III-92
3.75	Belanja Hibah	III-98
3.76	Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	III-99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Peta Administrasi Kabupaten Banggai	I-2
2.1	Tema pembangunan daerah kabupaten banggai tahun 2021-2026	II-27
3.4	Gambar Indeks Risiko Bencana Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2022	III-41

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1	Luas (km ²) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai	I-3
3.1	Perkembangan IPM kabupaten Banggai 2018-2022	III-6
3.2	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banggai, 2011-2022	III-6
3.3	Perkembangan Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun) Kabupaten Banggai	III-7
3.4	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banggai	III-7
3.5	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah, 2020-2022	III-8
3.6	Perbandingan IPM Kabupaten Banggai dengan Nasional, 2020-2022	III-9
3.7	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kab.Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2021-2022	III-9
3.8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2021-2022	III-10
3.9	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2021-2022	III-10
3.10	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (ribu rupiah), Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2018-2022	III-11
3.11	Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Banggai, 2018-2021	III-13
3.12	Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	III-13
3.13	Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Nasional	III-14
3.14	Perbandingan TPT Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, 2021-2022	III-16
3.15	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Kab.Banggai Tahun 2017-2022	III-18
3.16	Capaian Kemiskinan Ekstrem 2020-2022	III-18
3.17	Persentase Kemiskinan Ekstrem Menurut Kab/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022 (Persen)	III-19
3.18	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kab/kota di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022 (jiwa)	III-19
3.19	Perkembangan Gini ratio Kabupaten Banggai, 2018-2022	III-22
3.20	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Nasional, 2020-2022	III-23
3.21	Perbandingan IDM Banggai dengan Provinsi dan Nasional, 2022	III-30
3.22	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banggai 2022	III-40

3.23	Populasi ternak dan unggas menurut jenisnya (ekor), 2022	III-49
3.24	Perbandingan IKP Kab.Banggai, Provinsi dan Nasional, 2022	III-52
3.25	Jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten banggai, 2012-2022	III-54
3.26	Perkembangan garis kemiskinan kabupaten banggai, 2012-2022	III-54
3.27	Perkembangan angka harapan hidup	III-54
3.28	Perbandingan IKA,IKU, dan IKL Kabupaten Banggai, 2020-2022	III-58
3.29	Perbandingan IKLH Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	III-58
3.30	Perkembangan jumlah restoran, 2019-2022	III-63
3.31	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai, 2019-2022	III-72
3.32	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Banggai, 2019-2022	III-79



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

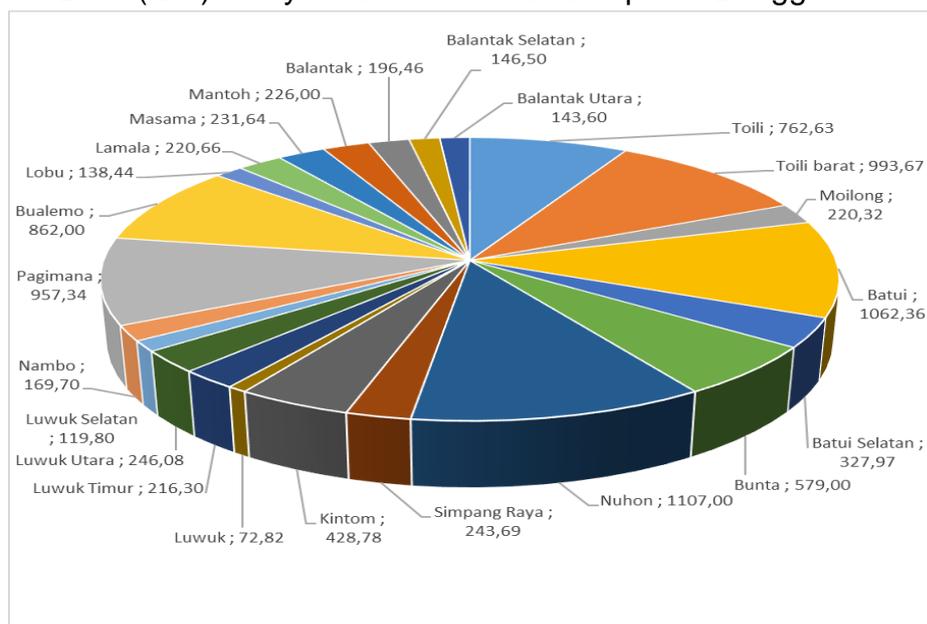
Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, serta berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022 merupakan tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Banggai adalah salah satu Kabupaten yang terbentuk sejak awal pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tanggal 1 April 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Selanjutnya, sebagian wilayah Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000.

Grafik 1.1
Luas (km²) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai



Sumber : BPS , Banggai Dalam Angka 2023

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai

Kecamatan	23	291	46	Jumlah Desa/Kelurahan
	Kecamatan	Desa	Kelurahan	
Toili		24	1	25
Toili Barat		17	-	17
Moilong		16	-	16
Batui		6	7	13
Batui Selatan		10	-	10
Bunta		18	4	22
Nuhon		20	-	20
Simpang Raya		12	-	12
Kintom		11	3	14
Luwuk		2	8	10
Luwuk Timur		13	-	13
Luwuk Utara		9	2	11
Luwuk Selatan		1	9	10
Nambo		5	6	11
Pagimana		31	3	34
Bualemo		19	-	19
Lobu		10	-	10
Lamala		12	-	12
Masama		14	-	14
Mantoh		10	-	10
Balantak		10	3	13
Balantak Selatan		11	-	11
Balantak Utara		10	-	10

Jarak antara ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten lain di Sulawesi Tengah yaitu :

- Luwuk ke Palu = 610 Kilo Meter
- Luwuk ke Parigi = 535 Kilo Meter
- Luwuk ke Poso = 388 Kilo Meter
- Luwuk ke Ampana = 248 Kilo Meter
- Luwuk ke Banggai = 100 Km/66 Mil Laut
- Luwuk ke Salakan = 61 Km/38 Mil Laut
- Luwuk ke Bungku = 161 Km/106 Mil Laut

1.2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai terletak pada posisi antara 0°30' dan 2°20' Lintang Selatan dan antara 122°23' dan 124°20' Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Banggai berada di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah di jalur koridor perairan Teluk Tolo, Selat Peling dan Teluk Tomini dan diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah keseluruhan 29.982,38 Km² dan 9.672,7 Km² atau 32,26 persen diantaranya merupakan daratan dan 20.309,68 Km² atau 67,74% merupakan wilayah laut. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis sebagai kawasan maritim yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2.1.3. Topografi

Dilihat dari kondisi topografi, Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam–sangat curam (>40%) sebesar 442.664 Ha atau sekitar 47.82% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan datar dengan kemiringan antara 0–15% di Kabupaten Banggai sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 21,06% atau 195.067 Ha, sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi sangat terbatas. Keadaan topografi Kabupaten Banggai berdasarkan kemiringan lereng, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Topografi Kemiringan Lereng di Kabupaten Banggai

No.	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0–2%)	142.253	15,36%
2.	Datar–Landai (2-15%)	52.814	5,70%
3.	Landai–Agak Curam–Curam (15–40%)	288.111	31,12%
4.	Curam–Sangat Curam (>40%)	442.664	47,81%

1.2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam. Potensi bencana alam di Kabupaten Banggai Terdiri atas:

a. Kawasan Rawan Banjir

Sebaran daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terdapat pada Kecamatan Toili, Batui dan Bonta, Pesisir utara dan pantai Bunta, Jalur Luwuk-Lamala, dan Pesisir Poh-Pagimana.

Strategi Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Banjir :

1. Melakukan Normalisasi sungai
2. Membatasi permukiman yang menempati dataran sempit pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan pegunungan yang berlereng terjal

b. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Hampir semua wilayah Banggai mempunyai potensi tsunami rendah. Adapun wilayah yang berpotensi tsunami sedang, tersebar di Kecamatan Bunta, Toili, Batui, Bualemo, dan Lamala. Wilayah yang rawan terhadap tsunami adalah Toili-Batui, Pesisir utara, dan pantai Bunta, Jalur Luwuk Lamala, Pesisir Poh-Pagimana, dan Pantai Bualemo.

c. Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Abrasi terjadi akibat gelombang dan arus laut yang menabrak garis pantai. Abrasi dapat diakibatkan oleh kondisi alamiah, misalnya terjadinya kenaikan muka air laut yang bersifat global. Abrasi juga dapat terjadi akibat perubahan arus laut sepanjang pantai karena aktifitas manusia mengubah morfologi pantai

seperti reklamasi, pembuatan pelabuhan besar, pengerukan dan penggalian bahan galian golongan C di tepi pantai.

d. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Berdasarkan hasil analisis dalam RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032, daerah rawan longsor di Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Daerah rawan longsor kelas rendah menyebar merata di seluruh Kabupaten Banggai yaitu di Kecamatan Toili, Kintom, Batui, Bunta, Luwuk, Bualemo, Lamala, Balantak, terutama pada wilayah yang berada pada pinggir perairan.
2. Kelas kerawanan sedang berada pada semua wilayah Banggai dengan dominasi di Kecamatan Toili, Batui, Bunta, Kintom, dan Pagimana.
3. Kelas kerawanan tinggi sangat dominan di Kecamatan Bunta dan Pagimana, dan sedikit di Kecamatan Toili, Batui, Kintom, Bualemo, Lamala, Luwuk, dan Balantak.

e. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Potensi gempa Bumi di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

▪ Kerawanan tinggi

Daerah kerawanan tinggi bencana gempabumi di Kabupaten Banggai adalah kawasan pesisir Kecamatan Batui dan Toili, sebagian pesisir Kecamatan Bunta, hampir seluruh pesisir Kecamatan Bualemo, sebagian pesisir Kecamatan Balantak, sebagian pesisir Kecamatan Lamala dan sebagian pesisir Kecamatan Luwuk bagian timur

▪ Kerawanan rendah

Hampir keseluruhan wilayah Banggai mempunyai kerawanan rendah, jauh lebih besar angka/luasannya dibandingkan wilayah yang mempunyai kerawanan tinggi.

f. Kawasan Rawan Bencana Erosi Permukiman dan Erosi Sungai

Strategi Penataan Ruang pada kawasan erosi permukaan dan erosi sungai :

- a. Menghindari aktivitas permukiman pada kawasan sekitar tebing sungai.
- b. Menghindari aktivitas permukiman pada hutan lindung DAS; dan
- c. Membuat tanggul-tanggul sungai yang rawan erosi, terutama untuk wilayah perkotaan.

1.2.1.5. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai sebesar 366.224 jiwa. Hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Kabupaten Banggai sebesar 362.275 jiwa. Kini laju pertumbuhan penduduk 2010-2022 sebesar 1,10%. Beberapa kecamatan memiliki persentase penduduk Kabupaten Banggai yang besar seperti Kecamatan Luwuk (10,48%) dan Kecamatan Toili (9,68%). Namun demikian, kepadatan penduduk terpusat pada Kecamatan Luwuk Selatan yaitu 200 orang/km. Peringkat kedua terpaut cukup jauh yaitu 94 orang/km pada Kecamatan Moilong. Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lobu (1,01%) dan Kecamatan Balantak Utara (1,22%). Kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai di 23 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan luwuk dengan kepadatan sebesar 534,37 jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Batui sebesar 15,89 jiwa/Km².

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk (ribu) Kab. Banggai Menurut Jenis Kelamin, 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Toili	18.622	17.685	36.307
Toili Barat	12.438	11.518	23.956
Moilong	10.051	9.654	19.705
Batui	9.824	9.369	19.193
Batui Selatan	7.899	7.455	15.354
Bunta	10.207	9.774	19.981
Nuhon	10.186	9.553	19.739
Simpang Raya	7.708	7.140	14.848
Kintom	5.932	5.902	11.834
Luwuk	16.734	16.736	33.470
Luwuk Timur	6.646	6.271	12.917
Luwuk Utara	9.920	9.863	19.783
Luwuk Selatan	12.231	12.117	24.348
Nambo	4.341	4.416	8.757
Pagimana	12.350	11.880	24.230
Bualemo	9.677	9.342	19.019
Lobu	2.064	2.029	4.093
Lamala	3.778	3.518	7.296
Masama	6.184	5.995	12.179
Mantoh	3.685	3.342	7.027
Balantak	3.034	2.911	5.945
Balantak Selatan	2.807	2.592	5.399
Balantak Utara	2.512	2.470	4.982
Jumlah	188.830	181.532	370.362

Sumber : Dinas Dukcapil Kab.Banggai

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Banggai sebanyak 188.830 jiwa atau 50,99 persen dari penduduk Kabupaten Banggai, sementara jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banggai sebanyak 181.532 jiwa, atau 49,01 persen dari penduduk Kabupaten Banggai. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan rasio jenis kelamin penduduk Kab. Banggai sebesar 104,02.

1.3. ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 208 sampai dengan Pasal 235 menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Tipe A;
 6. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A;
 9. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A;
 10. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A;

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A;
 13. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
 15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Tipe B;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B;
 17. Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan Dinas Tipe B;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
 19. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B;
 20. Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe A;
 21. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan merupakan Dinas Tipe A;
 22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Tipe A;
 23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan Tipe A;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A;
 3. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Tipe A;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe A;
- f. Rumah Sakit, terdiri dari :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk
 2. RSUD Pratama dr. Abd. Chalik Masulili Pagimana
- g. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Luwuk merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Bunta merupakan Kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Kintom merupakan Kecamatan Tipe A;
 4. Kecamatan Pagimana merupakan Kecamatan Tipe A;

5. Kecamatan Batui merupakan Kecamatan Tipe A;
6. Kecamatan Balantak merupakan Kecamatan Tipe A;
7. Kecamatan Lamala merupakan Kecamatan Tipe A;
8. Kecamatan Bualemo merupakan Kecamatan Tipe A;
9. Kecamatan Masama merupakan Kecamatan Tipe A;
10. Kecamatan Toili merupakan Kecamatan Tipe A;
11. Kecamatan Luwuk Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
12. Kecamatan Toili Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
13. Kecamatan Balantak Selatan merupakan Kecamatan Tipe A ;
14. Kecamatan Luwuk Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
15. Kecamatan Luwuk Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
16. Kecamatan Batui Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
17. Kecamatan Nuhon merupakan Kecamatan Tipe A;
18. Kecamatan Moilong merupakan Kecamatan Tipe A;
19. Kecamatan Simpang Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
20. Kecamatan Lobu merupakan Kecamatan Tipe A;
21. Kecamatan Mantoh merupakan Kecamatan Tipe A;
22. Kecamatan Balantak Utara merupakan Kecamatan Tipe A; dan
23. Kecamatan Nambo merupakan Kecamatan Tipe A;

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banggai didukung oleh Aparatur Sipil Negara. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai sebanyak 7.257 orang yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tebel 1.4
Kondisi ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2022

ASN	Golongan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS	IV	IV/a	400	482	882
		IV/b	349	368	717
		IV/c	40	14	54
		IV/d	2	2	4
	III	III/a	270	439	709
		III/b	399	642	1.041
		III/c	411	643	1.054
		III/d	531	701	1.232
	II	II/a	28	6	34
		II/b	130	88	218
		II/c	147	96	243
		II/d	253	325	578
I	I/a	5		5	

	I/b		2	1	3
	I/c		12		12
	I/d		12		12
Total PNS			2.991	3.807	6.798
PPPK	VII	VII	6	28	34
	IX	IX	113	312	425
Total PPPK			119	340	459
JUMLAH			3.110	4.147	7.257

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai

Tabel 1.5
Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

ASN	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS	S-3	4	1	5
	S-2	146	121	267
	S-1	1.862	2.432	4.294
	Diploma	245	705	950
	SMA/SMK	700	547	1.247
	SMP	25	1	26
	Sekolah Dasar	9		9
Total PNS		2.991	3.807	6.798
PPPK	S-1	113	312	425
	Diploma	6	28	34
Total PPPK		119	340	459
JUMLAH		3.110	4.417	7.257

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai

Tabel 1.6
Kondisi ASN Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

ASN	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS	≤24	3	5	8
	25-29	33	56	89
	30-34	65	209	274
	35-39	322	621	943
	40-44	552	795	1.347
	45-49	502	681	1.183
	50-54	797	788	1.585
	55-59	709	650	1.359
	≥60	8	2	10
Total PNS		2.991	3.807	6.798
PPPK	≤24		2	2
	25-29	21	43	64
	30-34	22	89	111
	35-39	47	100	147
	40-44	12	63	75
	45-49	12	28	40
	50-54	5	14	19
	55-59		1	1

Total PPPK		119	340	459
JUMLAH		3.110	4.147	7.257

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) kedepannya. Adapun isu strategis atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai pada tahun 2022 yang juga tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

1. Dampak Pandemi Covid-19
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Kemiskinan dan Pengangguran
4. Keterbatasan Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah
5. Air Bersih, Sanitasi, Perumahan Layak dan Terjangkau
6. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah
7. Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Digital
8. Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah
10. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

1.5. LANDASAN HUKUM

Penyusunan laporan kinerja Kabupaten Banggai tahun 2022 di susun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Nomor 143).

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang, gambaran umum daerah, organisasi, isu-isu strategis, landasan hukum, dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja di masa mendatang.

Lampiran

Berisi data-data pendukung



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta akuntabel (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyusun dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai memuat arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Banggai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL”**

Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kabupaten Banggai, adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumber daya alam dan lingkungan alamiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Banggai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah geografis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Banggai Maju, di maknakan sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang di ukur berdasarkan indikator sosial ekonomi,

budaya dan politik. Dari indikator sosial, kemajuan daerah di ukur dari kualitas sumber daya manusianya, di katakan makin maju apabila sumber daya manusianya Berkepribadian Bangsa, berahlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi yang tercermin dalam produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju di tandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, derajat kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Berdasarkan indikator ekonomi, kemajuan daerah di ukur berdasarkan tingkat pendapatan rata – rata masyarakatnya dan distribusi/kontribusi sektor terhadap pembentukan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) nya. Daerah maju pada umumnya ditandai dengan telah berkembangnya sektor industri dan sektor jasa.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan, hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan perdagangan yang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Kemajuan daerah juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, dari segi daya dukung sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, terampil dan profesional, ekonomi daerah yang berdaya saing, ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat diakses secara luas dan merata serta manajemen pelayan publik yang efektif , efisien dan

memberi dampak bagi berdayanya fungsi – fungsi ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan, sosial, budaya dan kehidupan keagamaan.

Makna Visi Banggai Maju ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya PDRB/Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, pendapatan perkapita serta inflasi stabil dan terkendali.
2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.
3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan bertambahnya Desa yang berstatus maju dan mandiri.
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
5. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB meningkat.
6. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.

Banggai Mandiri, dimaknakan sebagai suatu kondisi dimana Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Atau dengan kata lain kemandirian daerah adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya dengan mengandalkan pada prakarsa, kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri. Makna kemandirian diartikan sebagai optimalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat pada meningkatnya kontribusi/proporsi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atau dengan kata lain berkurangnya tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer kedaerah oleh pemerintah pusat, melalui kemandirian keuangan daerah.

Makna Visi Banggai Mandiri ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan melalui optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.
2. Kapasitas Fiskal Daerah meningkat signifikan, dengan mengoptimalkan Dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa.

Banggai Sejahtera, di maknakan sebagai kondisi di mana masyarakat Kabupaten Banggai mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas, kebebasan mengemukakan pendapat, menggunakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Daerah yang sejahtera juga di tunjukan oleh berkurangnya kesenjangan antar daerah / wilayah, baik perkotaan dan perdesaan serta daerah terpencil dan terisolir, tersedianya infrastruktur serta terbinanya kekuatan – kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Makna Visi Banggai sejahtera ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat yang di tunjukan oleh Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender meningkat.
2. Pendapatan masyarakat meningkat di barengi dengan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok.
3. Meningkatnya lapangan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran berkurang.

Berbasis Kearifan Lokal, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan). Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh adanya hal – hal sebagai berikut :

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.
3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even atau kegiatan budaya.
4. Terpeliharanya Cagar Budaya Daerah.
5. Harmonisasi dan moderasi kehidupan umat beragama di daerah.

Berdasarkan Visi dan maknanya sebagaimana telah di uraikan di atas, maka target makro daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian/perwujudan Visi Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Sesuai Periode RPJMD Tahun 2021 – 2026

Indikator	Base Line Data (2020*)	Target Akhir RPJMD
Banggai Maju		
1. Pertumbuhan Ekonomi	2,54%	5,99%
2. Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	75,76	83,09
3. Tingkat Inflasi	0,83%	2,00%
4. Prosentase Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi Baik	NA	80,00%
5. Presentase Desa Maju berdasarkan IDM	26,12%	75,00%
Banggai Mandiri		
6. Kapasitas Fiskal Daerah	Tinggi	Tinggi
7. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,06%	13,56%
Banggai Sejahtera		
8. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,39%	5,00%
9. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	2,42%	2,18%
10. Gini Rasio	0,308	0,277
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,22	73,57
12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	46,9
Kearifan Lokal		
13. Indeks Kerukunan Beragama	NA	80
14. Indeks Pembangunan Kebudayaan	NA	56,31

Keseluruhan target Visi sebagaimana di atas, hanya dapat di capai dan di laksanakan dengan di dukung oleh pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntable melalui pelaksanaan reformasi Birokrasi, sehingganya ukuran keberhasilan perwujudan Reformasi Birokrasi akan menentukan keberhasilan pencapaian Visi RPJMD.

Guna membangkitkan semangat dan pemahaman Bersama dari seluruh stakeholders pembangunan daerah Kabupaten Banggai, Visi kemudian di terjemahkan kedalam motto, slogan ataupun *Tag Line* pembangunan daerah Kabupaten Banggai 2021-2026 yaitu **BANGGAI LEBIH BAIK** atau dalam Bahasa Saluan, Balantak dan Banggai sebagai perwujudan dari kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah di terjemahkan menjadi **BANGGAI MAIMA, BANGGAI PORE, ATAU BANGGAI MONONDOK.**

Banggai Lebih Baik dapat di terjemahkan sebagai kondisi Kabupaten Banggai yang lebih baik dari sebelumnya yang menunjukkan kondisi lebih Maju, lebih Mandiri dan lebih sejahtera, yang dapat di gambarkan antara lain dalam perwujudan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia lebih baik
2. Ekonomi Kerakyatan lebih baik
3. Infrastruktur lebih baik
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lebih Baik
5. Pariwisata dan Budaya Lebih baik
6. Birokrasi Lebih baik

Sebagai landasan kerja dan landasan Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam mencapai Banggai Lebih Baik, Moto yang di gunakan adalah CERDAS yaitu mampu membaca dan memahami apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat, SANTUN yaitu siap dan ikhlas menerima, menyerap dan menindaklanjuti seluruh kritik, masukan dan aspirasi masyarakat serta RELIGIUS yaitu menggunakan pendekatan Aqidah, Syariah dan Ahlak dalam melakukan setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2. Misi

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya serta Nilai Keagamaan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.



Adapun penjabaran unsur Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026 kedalam Misi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Katerkaitan Pokok – Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Periode 2021-2026

Pokok Visi	Misi Terkait	
Banggai Maju	Di terjemahkan dalam Misi ke (1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif Dan Sejahtera	Pokok – pokok Visi dan Pelaksanaan misi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 lainnya akan terlaksana dengan baik jika di tunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Misi ke (6) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel
	Di terjemahkan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (3) Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	
Banggai Mandiri	Dilaksanakan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang	

	Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (6) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel.	
Banggai Sejahtera	Di terjemahkan dalam Misi ke (1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas , Produktif Dan Sejahtera.	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	
	Dilaksanakan dalam Misi ke (3) Mengembangkan sektor Kemaritiman berbasis potensi wilayah	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	
Berbasis Kearifan Lokal	Dilaksanakan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai selama Periode Tahun 2021 - 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah 2021 – 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal		
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif, dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera
Misi 2 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan	1. Meningkatkan Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha

	Keunggulan Lokal	Baru 2. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan
Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana	Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana	1. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak, dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas 2. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	1. Peningkatan Pariwisata Daerah 2. Peningkatan Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	1. Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah 2. Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan Serta Moderasi Beragama

Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel
--	--	--

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Banggai, maka di rumuskan strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai tahun 2021-2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (milestone) Kabupaten Banggai periode 2021 - 2026.

2.2.1. Strategi Umum Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026, maka di tetapkan strategi umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka responsif dan adaptif, agar mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Di harapkan proses reformasi birokrasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak sekedar merupakan kesibukan dan kebutuhan Pemerintah semata.
2. Membangun dan mengembangkan kemitraaan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia akademik, serta pemangku kepentingan lainnya, agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini di dasari pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya finansial di satu sisi, sedangkan disisi lain terdapat potensi sumberdaya alam yang harus dikelola bersama secara berkelanjutan.
3. Pemantapan demokrasi, kesetaraan, serta perluasan akses dan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat dan perannya dalam pembangunan,

melalui implementasi keikutsertaan Kabupaten Banggai dalam inisiatif global keterbukaan pemerintah daerah dalam Open Government Partnership (OGP) Local , agar nantinya masyarakat bisa mejadi potensi pembangunan, bukan menjadi beban.

4. Mengembangkan kemandirian desa agar terjadi penyebaran pusat pusat pertumbuhan, utamanya pusat pertumbuhan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan layanan sosial ekonomi masyarakat sehingga pembangunan akan menjadi efektif dan efisien, dan mengurangi biaya masyarakat maupun beban perkotaan.
5. Menjaga prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya alam.
6. Memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, memastikan kelompok rentan akan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan.
7. Mengedepankan pendekatan Tematik – Holistik, Integratif dan Spasial dalam perumusan program pembangunan daerah serta Money Follow Program sehingga terwujud pemerintahan yang berorientasi hasil melalui Performance Based Budgetting

2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabrl di bawah ini :

Tabel 2.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunnan Daerah 2021-2026

VISI
Terwujudnya Kabupaten Banggai Yang Maju, Mandiri,
dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA			
Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten yang	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar menuju Banggai	1. Penuntasan Program pendidikan wajar 9 tahun dan peningkatan wajib belajar 12 tahun.

Sejahtera	Produktif dan Sejahtera	Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 3. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 4. Percepatan Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, Kelas Parenting, Penguatan UKS dan Sanitasi Sekolah, untuk pencegahan stunting. 5. Penerapan Pendidikan budaya dan budi pekerti/karakter di sekolah. 6. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebaran yang merata pada semua satuan Pendidikan dasar. 7. Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan melalui Gerakan literasi masyarakat.
		Meningkatkan akses dan Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan Mutu layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan layanan Rujukan. 2. Peningkatan capaian SPM Kesehatan melalui Digitalisasi Pelayanan. 3. Penyediaan tenaga

			<p>kesehatan dengan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan sediaan farmasi dan alat Kesehatan serta pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat. 7. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.
		<p>Banggai produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelatihan kerja dan Penyelenggaraan Diklat Vokasional. 2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. 3. Peningkatan layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja. 4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik. 5. Fasilitasi Perkembangan usaha rintisan (Start up Company). 6. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.

		<p>Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan sesuai skema Bansos Adaaktif. 2. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi “Tumis Ikan Teri” (Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi). 3. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. 4. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 5. Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosia Bagi PMKS. 6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
		<p>Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. 2. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak

			<p>perempuan dalam ketenagakerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 5. Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 6. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA).
		<p>Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif. 2. Pencegahan prilaku beresiko pada pemuda (bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAFZA, Miras dan HIV/AIDS). 3. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka.

			<p>4. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga.</p> <p>5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.</p>
Misi II : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi			
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif, dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal	Meningkatnya Kualitas Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM Serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Fasilitas Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital	<p>1. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kewirausahaan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster sesuai sentra komoditas dan wilayah.</p> <p>2. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan.</p> <p>3. Modernisasi dan penerapan Inovasi Teknologi pada produk dan jasa Koperasi dan UMKM.</p> <p>4. Iklim Usaha UMKM yang kondusif.</p> <p>5. Digitalisasi pemasaran UMKM dan koperasi.</p>
		Mempekuat Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri dan Perdagangan	<p>1. Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <p>3. Peningkatan nilai</p>

			<p>eksport daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah 5. Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar
	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Pedesaan	Meningkatkan Pembangunan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat dalam Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pedesaan melalui BUMDes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa, melalui Kerjasama antar desa. 2. Revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta. 3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan/ kawasan perdesaan melalui BUMDes. 4. Peningkatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat perdesaan. 5. Pemanfaatan Pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di Pedesaan (program satu juta satu pekarangan)
Misi III : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana			
Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan pedesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten. 2. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau

		bermartabat.	<p>bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan. 4. Peningkatan kualitas layanan Air Minum perkotaan melalui PDAM.
		Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Infrastruktur persampahan. 2. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui prinsip reduce, reuse dan recycle.
		Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama penyediaan infrastruktur dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU. 2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai. 3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, utamanya di wilayah terpencil, pedalaman dan daerah rawan bencana. 4. Penyediaan sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman. 5. Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas

			<p>jalan.</p> <p>6. Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan kepulauan Taliabo.</p>
		Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kab. Banggai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan. 2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
		Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan IMB dan regulasi bangunan gedung. 2. Penyediaan Fasilitas Pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.
		Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Implementasi Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai. 2. Pembangunan Infrastruktur TIK dan system jaringan intra Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi digital. 3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 4. Peningkatan keterbukaan informasi public dan Literasi TIK masyarakat (Digital society).
	Meningkatnya Ketahanan	Meningkatkan ketahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana

	Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dan data Bencana terpadu. 3. Penguatan system peringatan dini bencana. 4. Penguatan system logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana. 5. Pengembangan Desa Tangguh Bencana/Desa Tangguh lawan covid 19. 6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan			
Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya investasi dan pengelolaan potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B). 2. Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga). 3. Peningkatan

			<p>Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian.</p> <p>4. Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.</p>
		<p>Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai swasembada daging</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak.</p> <p>2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak.</p> <p>4. Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing.</p> <p>5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.</p>
		<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan.</p>	<p>1. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.</p> <p>2. Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan).</p> <p>3. Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>
		<p>Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam,</p>	<p>1. Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan</p>

		bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	<p>kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Implementasi Perda Lahan Pangan Berkelanjutan. 3. Pemanfaatan Lahan pekarangan melalui implementasi Inovasi satu juta satu pekarangan.
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian/ perkebunan. 2. Peningkatan peran dan fungsi Kelembagaan Peternak. 3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Nelayan dan pembudidaya ikan.
		Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas, melalui pembentukan/revitalisasi dan pemberdayaan BUMD. 2. Percepatan pembangunan usaha industri minyak & gas daerah dengan melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas. 3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak & gas. 4. Re-negosiasi antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat

			<p>Kabupaten Banggai.</p> <p>5. Percepatan pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas.</p>
		Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal. 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta. 4. Peningkatan kemitraan antara PMA dan PMD dengan UKM Lokal.
	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 4. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman hayati. 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pembangunan rendah karbon. 6. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle.
		Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai

		pertanahan.	<p>Tahun 2012 – 2032 dan rencana rincinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah. 3. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan.
Misi V : Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan			
Peningkatan Pariwisata Daerah	Meningkatnya Pariwisata Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi , industry, promosi dan kelembagaan pariwisata daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas. 2. Pengembangan pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif. 4. Pengembangan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata.
Peningkatan Kebudayaan Daerah serta Moderasi Beragama	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan. 2. Pengembangan seni dan budaya Babasalan 3. Pemanfaatan kekayaan Budaya Babasalan untuk kesejahteraan rakyat banggai melalui pengembangan Pariwisata Budaya. 4. Pelestarian serta pengelolaan Cagar Budaya dan Museum Daerah.
		Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan idiologi Pancasila di tengah masyarakat. 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. 3. Pengembangan

		Banggai.	ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
Misi VI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel			
Peningkatan Kualitas Reformasi di Kabupaten Banggai untuk terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banggai.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha. 2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan. 3. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik. 5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah pengampu SPM. 6. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
		Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banggai Inovatif 2. Penguatan Kembali Laboratorium Inovasi Daerah

Tabel 2.5
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH				
2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera

<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital
<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan
<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan investasi sektor pertambangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan investasi sektor pertambangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan investasi sektor pertambangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan investasi sektor pertambangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan investasi sektor pertambangan daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 2 (dua) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 2 (dua) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama.

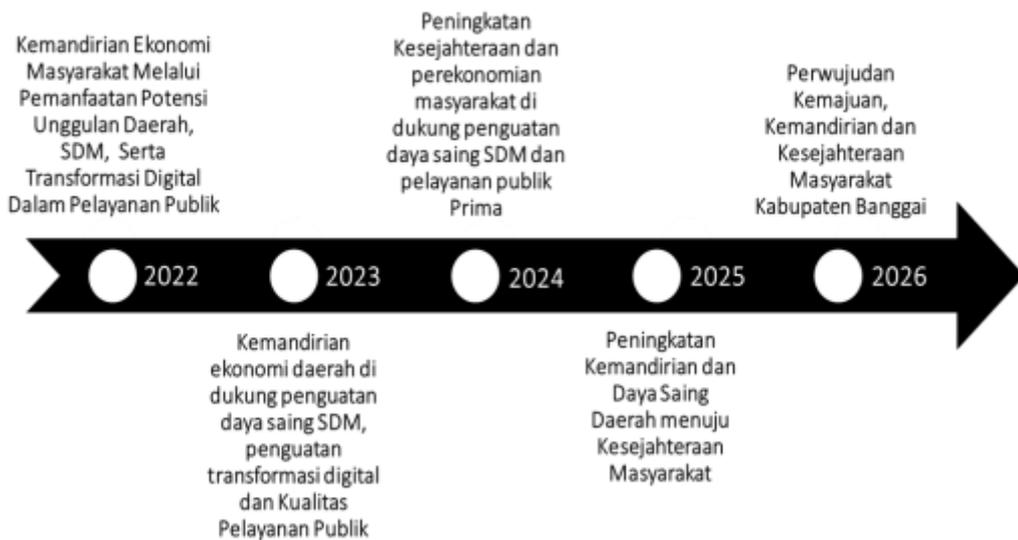
• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Pemantapan Reformasi Birokrasi	• Perwujudan Reformasi Birokrasi Kelas Dunia
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--

Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banggai di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Tema Pembangunan Tahunan RKPD Propinsi Sulawesi Tengah. Keselarasan Tema, Fokus dan Arah Kebijakan baik secara vertical maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antar daerah.

Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Banggai secara indikatif dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026



2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah. BANGGAI LEBIH BAIK akan di wujudkan melalui (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

Gambar 2.2

**Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2021 - 2026**



1. Pembangunan Manusias Berkualitas dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

a. Banggai Cerdas



Banggai Cerdas di maksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas di Kabupaten Banggai, agar tercipta peserta didik dengan dasar kecerdasan dan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan siap mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ruang lingkup Banggai Cerdas selain PAUD, pendidikan dasar, juga mencakup fasilitasi terhadap pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi.

b. Banggai Sehat



Banggai Sehat di maksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang ada. Fokus Banggai Sehat di arahkan pada pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak, penanggulangan stunting terintegrasi, PHBS, jaminan kesehatan dan kualitas layanan rumah sakit rujukan

c. Banggai Sejahtera



Banggai Sejahtera di maksudkan sebagai upaya pemerintah kabupaten banggai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan

d. Banggai Produktif



Banggai Produktif Di Maksudkan Sebagai Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, Penyiapan Tenaga Kerja Yang

secara terintegrasi multi sektor. Penanggulangan kemiskinan di lakukan melalui inovasi “Tumis Ikan Teri” = tuntaskan kemiskinan melalui kegiatan terintegrasi

Terintegrasi Dengan Kebutuhan Industri. Serta Penyiapan Wirausaha Mandiri, Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Kegiatan Yang Di Lakukan Dalam Bentuk Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan Dan Pembimbingan

e. Banggai Youthpreneur



Banggai Youthpreneur Merupakan Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai Untuk Menggali Dan Mengembangkan Potensi Dan Kemandirian Pemuda Untuk Berwirausaha. Kegiatan Ini Di Lakukan Dalam Bentuk Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan Maupun Bantuan Modal Usaha.

2. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

a. Banggai Berdaya



Banggai Berdaya di maksudkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memperkuat ekonomi produktif/ kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi Dan Ekonomi Kreatif. Pemberdayaan/ Penguatan di maksud di lakukan melalui pelatihan, pembinaan, pembimbingan, pendampingan serta pemberian bantuan modal

b. Banggai Desapreneur



Banggai Desapreneur merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mendorong kemandirian ekonomi perdesaan, melalui penguatan kapasitas pemerintah desa dan revitalisasi peran BUMDesa serta Inovasi Desa. Banggai Desapreneur akan di dukung oleh program satu juta satu pekarangan dan satu BUMDes Rp.500 juta

c. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Akses



Banggai Akses merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yaitu air bersih, rumah layak huni dan sanitasi layak, serta infrastruktur wilayah yaitu jalan, jembatan, infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan ketenagalistrikan (Banggai Terang). Banggai Akses juga di harapkan dapat mengatasi kesenjangan/ketimpangan wilayah.

d. Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Swasembada Pangan



Banggai Swasembada Pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat

e. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan

Banggai Investment



Banggai Investment merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di daerah melalui iklim investasi yang kondusif, kemudahan berusaha, serta investasi pengelolaan keunggulan daerah melalui revitalisasi BUMD dan kerjasama usaha dengan perusahaan multinasional/ internasional

f. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.

Prioritas daerah ini di arahkan untuk mewujudkan ketahanan/kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Selain itu di maksudkan sebagai kemampuan daerah untuk menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, melalui pemanfaatan ruang sesuai arahan tata ruang

g. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Cultural Heritage



Banggai Cultural Heritage merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menjadikan Banggai sebagai pusat kebudayaan dan sentra promosi budaya, sekaligus sebagai atraksi budaya dalam destinasi pariwisata.

Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif dengan Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan

h. Penguatan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Amanah



Banggai Amanah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui perbaikan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Banggai Amanah juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan (jangka menengah lima tahun) dan sasaran strategis (jangka pendek tahunan) organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggai 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		4. Angka Kemiskinan
		5. Gini Rasio
2	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB
3	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM
4	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik

5	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Penigkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
6	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan Terhadap PDRB
		2. Indeks Ketahanan Pangan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
9	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan
10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	1. Indeks Reformasi Birokrasi
		2. Indeks Inovasi Daerah
		3. Nilai SAKIP

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banggai ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. Transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, sasaran yang hendak dicapai dengan target indikator *output* dan atau *outcome*.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Adapun wujud dari Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022 berdasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis pada RPJMD sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,3
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,34%
		4. Angka Kemiskinan	6,70%
		5. Gini Rasio	0,297
2	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	3,7%
3	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	37,80%
4	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik	70,00%
5	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah
6	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	3. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan Terhadap PDRB	33,23%
		4. Indeks Ketahanan Pangan	86,64
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,418
8	Meningkatnya Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata	2,37%

	untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	terhadap PDRB	
9	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,11
10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	4. Indeks Reformasi Birokrasi	B
		5. Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		6. Nilai SAKIP	A

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.504.758.902.107,00 (*dua triliun lima ratus empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu seratus tujuh rupiah*).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja di lakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya di capai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja di lakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang di harapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Banggai Tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun pertama RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran di gunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interpretasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik (SB)
2	Lebih dari 75% - 100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	<55%	Kurang (K)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kerja Kabupaten Banggai dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas per sasaran di gunakan rumus sebagai berikut :

1. Efisiensi = % Rata-rata capaian kinerja - % Realisasi anggaran
2. Efektivitas = (% Rata-rata capaian kinerja/% Realisasi anggaran) x 100%

Efisiensi dan efektivitas baru dihitung apabila capaian kinerja \geq 100% Pengukuran terhadap kinerja selain dari capaian kinerja juga dari efisiensi dan efektivitas sumber daya, efisiensi diukur dengan persentase dari selisih rata-rata capaian kinerja dengan % realisasi anggaran, sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur jumlah dari capaian kinerja dengan efisiensi anggaran.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 7 (Tujuh) Tujuan dan 10 (sepuluh) Sasaran, dengan 17 (tujuh belas) Indikator sasaran. **Misi I** terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, **Misi II** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, **Misi III** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, **Misi IV** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, **Misi V** terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dan **Misi VI** terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1					
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	71,08	99,15	Baik
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,3	73,06	161,28	Sangat Baik
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,34%	3,09	67,95	Cukup
4	Angka Kemiskinan	6,70%	7,33	90,59	Baik
5	Gini Rasio	0,297	0,315	93,94	Baik
Sasaran 2					
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru					
1	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	3,7%	4,36	117,84	Sangat Baik
Sasaran 3					
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan					
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	37,80%	40,54	107,25	Sangat Baik
Sasaran 4					
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas					
1	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	70,00%	71,91	102,73	Sangat Baik
Sasaran 5					
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Baik
Sasaran 6					
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah					
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	33,23%	40,13	120,76	Sangat Baik
2	Indeks Ketahanan Pangan	86,64	85,73	98,95	Baik
Sasaran 7					
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,418	79,20	98,48	Baik
Sasaran 8					
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah					
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,37%	0,30%	12,66	Kurang
Sasaran 9					
Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,11	23,04	47,89	Kurang
Sasaran 10					
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100	Baik
2	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Baik
3	Nilai SAKIP	A	A	100	Baik

Tabel 3.3
Rekap Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Indikator Sasaran
1	Misi 1	1	1	5	SB=1 , B=3 , C=1 , K=0
2	Misi 2	1	2	2	SB=2 , B=0 , C=0 , K=0
3	Misi 3	1	2	2	SB=2 , B=0 , C=0 , K=0
4	Misi 4	1	2	3	SB=1 , B=2 , C=0 , K=0
5	Misi 5	2	2	2	SB=0 , B=0 , C=0 , K=2
6	Misi 6	1	1	3	SB=0 , B=3 , C=0 , K=0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.2 terdapat 17 indikator kinerja utama (IKU) dapat disimpulkan bahwa 15 (lima belas) IKU memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 94,63% kriteria Baik, sedangkan 1 (satu) IKU kategori Tinggi dan 1 (satu) IKU Kategori Inovatif.

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Indeks	69,31 - 69,86	70,60	101,06	71,69	71,08	99,15	73,57	96,61
2	Indeks	-	-	-	45,3	73,06 *	161,28	46,9	155,78
3	%	3,35 – 4,02	3,57	111,19	2,34	3,09	67,95	2,18	58,26
4	%	8,97 – 8,88	7,83	111,82	6,70	7,33	90,59	5,00	53,4
5	Point	0,300 – 0,294	0,277	107,67	0,297	0,315	93,94	0,277	86,28
Rata-rata capaian kinerja				86,35			102,60		90,07

Sumber :

BPS Kab.Banggai, *) DP2KBP3A , Realisasi masih menggunakan hasil tahun 2021

Dari 5 indikator pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera” diperoleh capaian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai 99,15%, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercapai 161,28%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercapai 67,95%, Angka Kemiskinan tercapai 90,59%, dan Gini Rasio tercapai 93,94%, sehingga rata-rata capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera” tercapai 102,60% kategori Sangat Baik, dan dengan target akhir RPJMD rata-rata tercapai 90,07%.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2022, dimana target tahun 2022 sebesar 71,69 dan terealisasi sebesar 71,08 atau tumbuh sebesar 0,48 point dibandingkan tahun 2021 sebesar 70,60 dengan capaian kinerja sebesar 99,15 persen dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 tercapai 96,61 persen.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Grafik 3.1



Sumber : BPS Kab.Banggai

IPM Kabupaten Banggai setiap tahunnya mengalami perkembangan yaitu tahun 2019 tumbuh sebesar 0,51 point dari tahun 2018, tahun 2020 tumbuh 0,16 point dari tahun 2019, tahun 2021 tumbuh 0,08 point dari tahun 2020, dan tahun 2022 tumbuh 0,48 point dari tahun 2021.

Peningkatan IPM Kabupaten Banggai pada tahun 2022 didukung oleh peningkatan pada komponen pendidikan/pengetahuan dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari sisi dimensi pengetahuan berdasarkan grafik 3.2 diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2022 Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,34 tahun, meningkat 0,09 point di bandingkan pada tahun 2021. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata lama sekolah (RLS) telah menempuh Pendidikan selama 8,54 tahun meningkat 0,01 point di bandingkan pada tahun 2021.

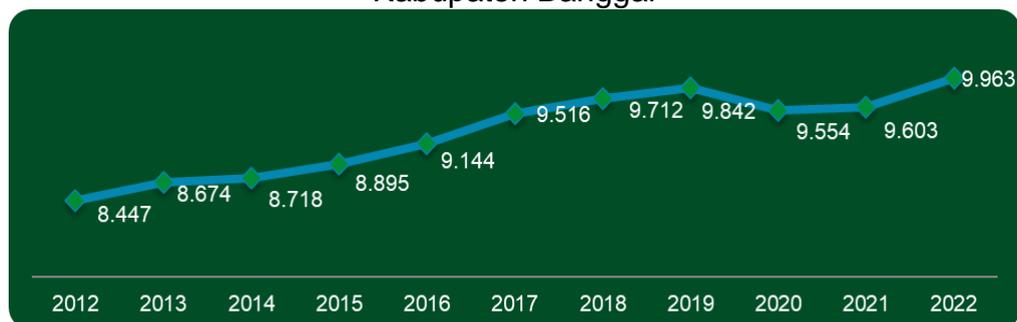
Grafik 3.2
Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Banggai



Sumber : BPS Kab.Banggai

Dari sisi dimensi Standar Hidup Layak berdasarkan grafik 3.3 yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang naik dari Rp. 9.603 juta di tahun 2021 menjadi Rp. 9.963 juta per tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar Rp. 360.

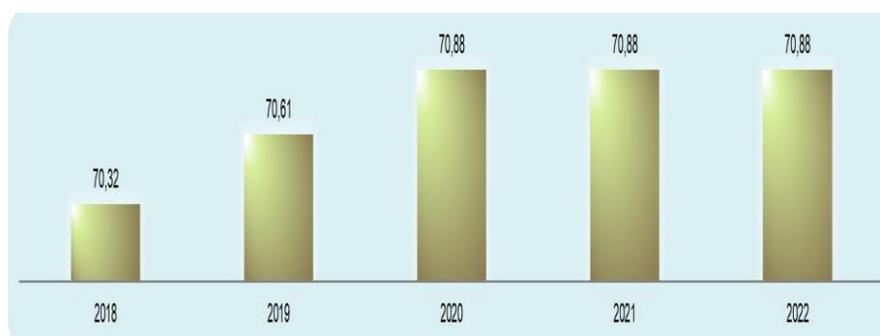
Grafik 3.3
Perkembangan pengeluaran per kapita (Ribuan rupiah/orang/tahun)
Kabupaten Banggai



Sumber : BPS Kab.Banggai

Dari sisi dimensi umur Panjang dan hidup sehat (UHH), bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,88 tahun.

Grafik 3.4
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Banggai



Sumber : BPS Kab.Banggai

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai
Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020 – 2022

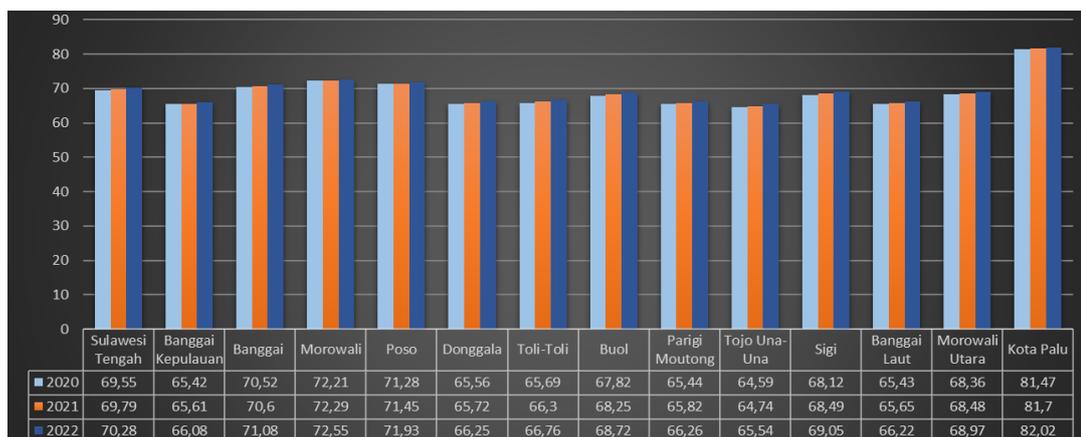
Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,88	70,88	70,88
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,24	13,25	13,34
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,52	8,53	8,54

Standar Hidup Layak				
Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan)	Rp. 000	9.554	9.603	9.963
IPM		70,52	70,60	71,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Banggai

Berdasarkan grafik 3.5 IPM Kabupaten Banggai tahun 2022 bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-4 dari Kota Palu dengan IPM sebesar 82,02 , Kabupaten Morowali sebesar 72,55, Kabupaten Poso sebesar 71,93. Namun bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28, IPM Kabupaten Banggai lebih tinggi dari pada IPM Provinsi yaitu sebesar 71,08 atau 0,8 point dari IPM Provinsi Sulawesi Tengah.

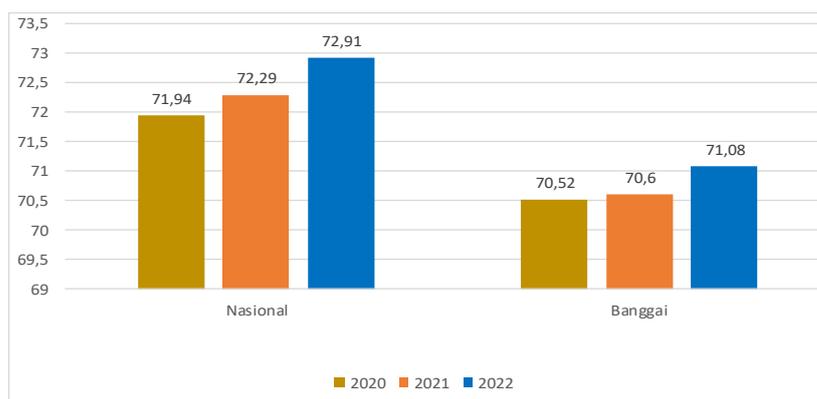
Grafik 3.5
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah,
2020 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan bila dibandingkan dengan IPM Nasional berdasarkan grafik 3.6 terlihat bahwa sepanjang tahun 2020 -2022 IPM Kabupaten Banggai lebih rendah dari pada capaian IPM Nasional. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Banggai lebih rendah 1,42 point dari IPM Nasional sebesar 71,94, di tahun 2021 lebih rendah 1,69 point dari IPM Nasional sebesar 72,29, sedangkan di tahun 2022 lebih rendah 1,83 point dari IPM Nasional sebesar 72,91.

Grafik 3.6
Perbandingan IPM Kabupaten Banggai dengan Nasional, 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

✓ Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2020 UHH telah meningkat sebesar 0,56 tahun. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah dapat terlihat pada grafik 3.7 berikut :

Grafik 3.7
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Kab.Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar
dan Nasional, 2021-2022



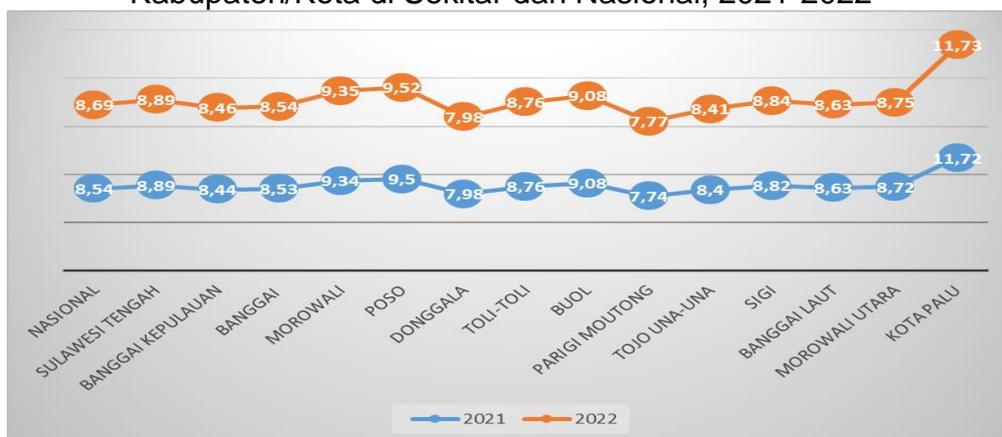
Sumber : Badan Pusat Statistik

✓ Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

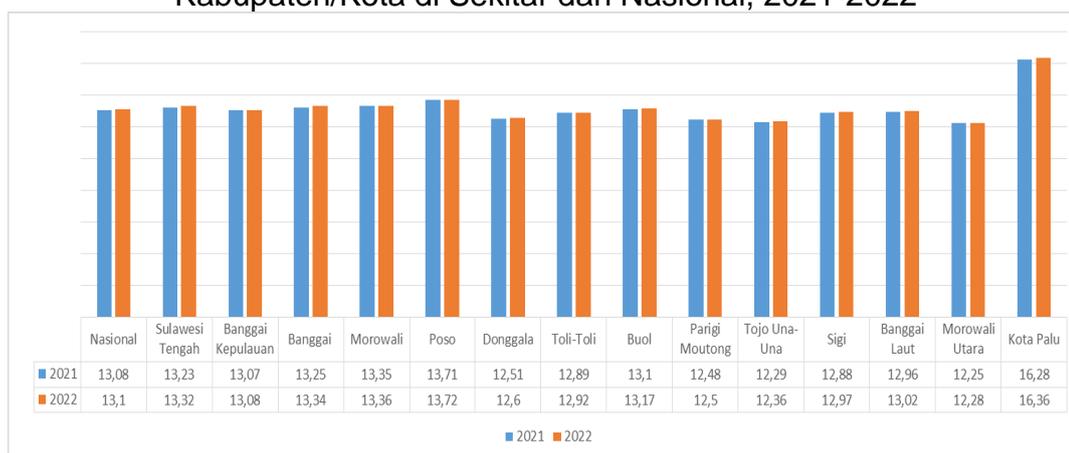
Selama periode 2011 hingga 2022, HLS Kabupaten Banggai tahun 2021 yaitu 13,25 Tahun dan pada Tahun 2022 HLS kabupaten Banggai yaitu 13,34 Tahun, sehingga adanya peningkatan sebesar 0,09 tahun. sementara RLS meningkat 0,01 tahun, dimana pada tahun 2021 RLS Kabupaten Banggai yaitu 8,53 Tahun namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 8,54 tahun. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah dapat terlihat pada grafik 3.8 berikut :

Grafik 3.8
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2021-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 3.9
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2021-2022



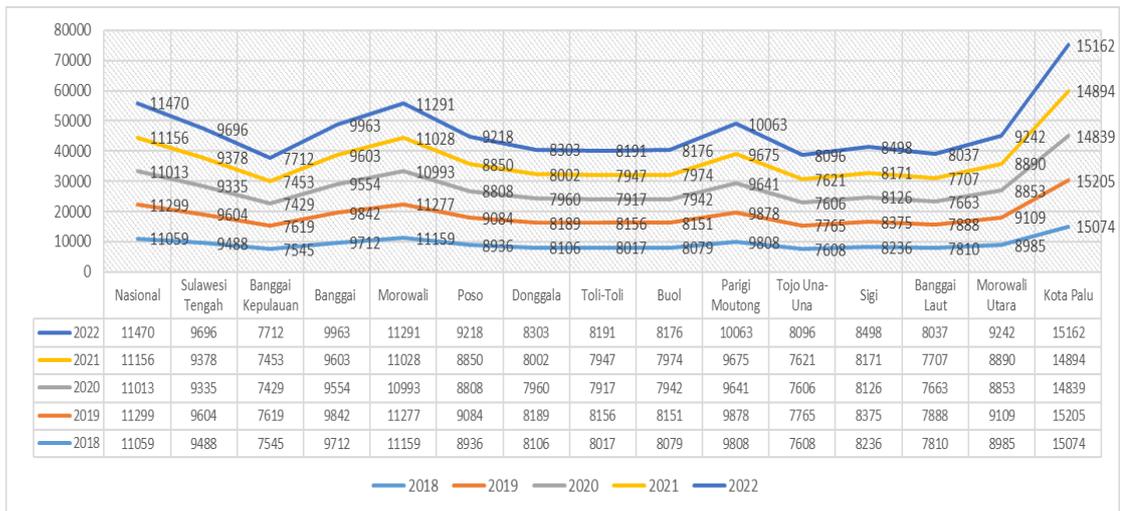
Sumber : Badan Pusat Statistik

✓ Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Berdasarkan pada grafik 3.4 di tahun 2022, pengeluaran

per kapita di Kabupaten Banggai Rp. 9.963 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.603 juta per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan terlebih khusus Kabupaten Banggai, pengeluaran per Kapita semakin meningkat. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, Provinsi di Sulawesi Tengah serta Nasional dapat terlihat pada grafaik 3.10 berikut :

Grafik 3.10
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (ribu rupiah),
Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional,
2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indikator dari Indeks Pemberdayaan gender (IDG) yaitu menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Realisasi indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai pada tahun 2022 menggunakan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 karena BPS masih menggunakan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 yaitu sebesar 73,06. Dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 73,06 telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2022 yaitu 45,3 dengan capaian kinerja sebesar 161,28 persen dengan kategori baik sekali, apabila

dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 tercapai 155,78 persen. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai merupakan indikator yang ada di tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2021-2026 dan di tahun 2021 tidak adanya indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berdasarkan RPJMD 2016-2021 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian indikator tahun sebelumnya.

Tabel 3.6
Pengarutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

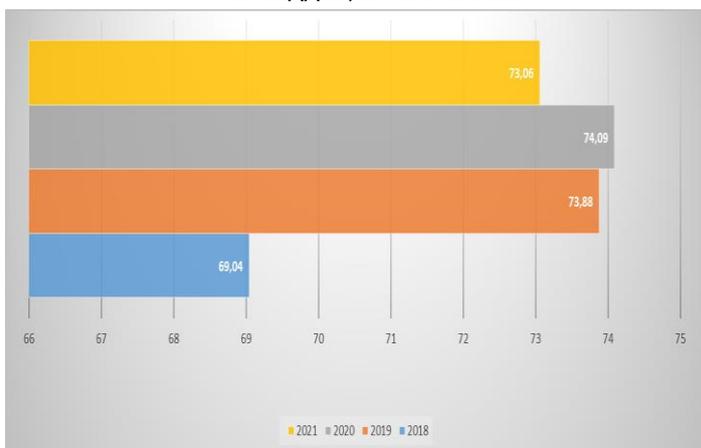
No	Uraian	Tahun 2022	Ket
1	Perempuan di bidang pemerintahan	4.147 Orang	Total ASN 7.257 Orang
2	Perempuan di bidang politik	10 Orang	Total Anggota DPR 35 Orang

Sumber : BPS Kab.Banggai, BKPSDM

Kehadiran perempuan di rana politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitive pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Sehingga berdasarkan tabel 3.6 bahwa keterlibatan perempuan di bidang politik tahun 2022 berjumlah 10 orang dari total anggota DPR yang berjumlah 35 orang hanya terdapat 28,57 % perempuan yang terlibat di bidang politik. Sedangkan untuk keterlibatan perempuan di bidang pemerintahan di tahun 2022 berjumlah 4.147 orang dari jumlah ASN Kabupaten Banggai 7.257 orang.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai selama kurun waktu 4 (empat tahun) tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.11
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten
Banggai, 2018-2021



Sumber : BPS Kab.Banggai

Dari grafik 3.11 terlihat bahwa IDG Kabupaten Banggai di tahun 2019 sebesar 73,88 mengalami peningkatan sebesar 4,84 point dari tahun 2018 sebesar 69,04. Untuk tahun 2020 sebesar 74,09 naik sebesar 0,21 point dari tahun 2019 sebesar 73,88. Dan ditahun 2021 sebesar 73,06 mengalami penurunan sebesar 1,03 point dari tahun 2020 sebesar 74,09.

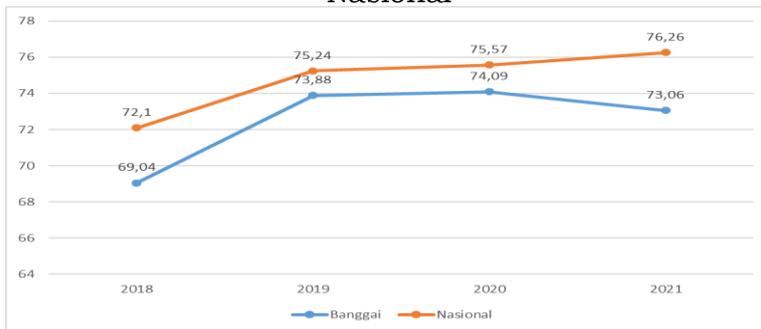
Grafik 3.12
Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota
di Sulawesi tengah



Sumber : BPS Kabupaten Banggai

Berdasarkan grafik 3.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai pada tahun 2021 lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Sulawesi Tengah. Namun lebih rendah 1,94 point bila dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 75,80.

Grafik 3.13
Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Nasional



Sumber : BPS Kab.Banggai

Berdasarkan grafik 3.13 bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai selama kurun waktu 4 tahun memperoleh nilai IDG tertinggi bila dibandingkan dengan nilai IDG Nasional.

Adapun hambatan/ kendala yang dihadapi untuk pencapaian kinerja yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan, dan pemberdayaan gender.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam Lembaga legislative, maupun upaya pemberdayaan perempuan dengan membangun sinergitas dengan masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dari tabel 3.4, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banggai pada tahun 2022 terealisasi sebesar 3,09% dari target 2,34% dan capaian kinerja sebesar 67,95%, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka masih tinggi belum mencapai target RPJMD. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,48 point di tahun 2022, dimana tingkat

pengangguran pada tahun 2021 sebesar 3,57% dengan capaian sebesar 111,19%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2022 terjadinya pengurangan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan tahun 2021 dengan adanya peningkatan terhadap penduduk yang bekerja pada usia angkatan kerja dengan total Angkatan kerja di Banggai sebanyak 217.399 jiwa, ada 210.675 jiwa yang telah bekerja. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya baru mencapai 58,26%.

Pada tabel 3.7 dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk usia angkatan kerja Tahun 2022 di Kabupaten Banggai, yaitu :

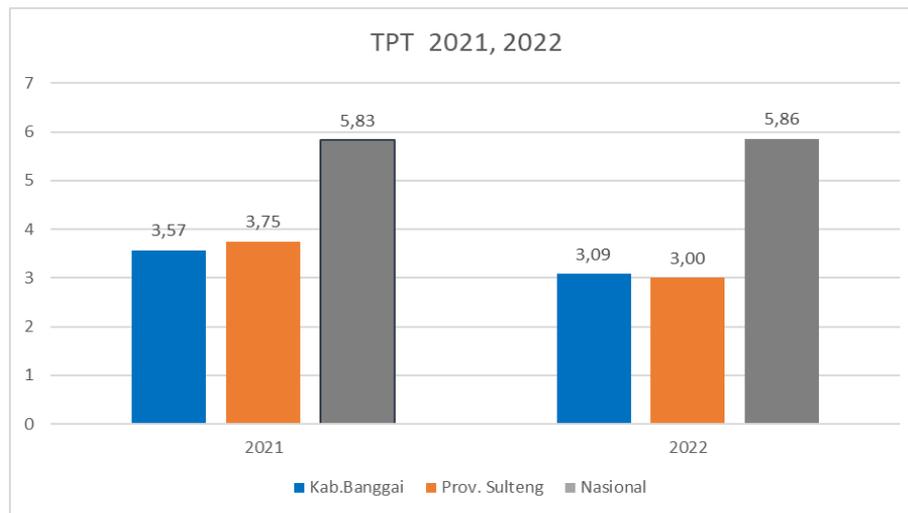
Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja Tahun 2022
Kabupaten Banggai

No	Angkatan Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah (Angkatan Kerja)		131.726	85.673	217.399
1	Bekerja	127.540	83.135	210.675
2	Pengangguran Terbuka	4.186	2.538	6.724
Persentase Tingkat Pengangguran		3,18	2,96	3,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Banggai

Bila dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sesuai grafik 3.14, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai tahun 2021 sebesar 3,57 lebih rendah 0,18 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,75 dan 2,26 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,83. Sedangkan pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai tahun sebesar 3,09 lebih tinggi 0,09 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,00 dan lebih rendah 2,77 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,83.

Grafik 3.14
Perbandingan TPT Kabupaten Banggai dengan
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, 2021-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia juga berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka di daerah. Oleh sebab itu pembangunan SDM di Kabupaten Banggai diarahkan agar benar-benar mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Daerah. Selain itu, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia.

Hambatan untuk mencapai indikator ini adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lowongan kerja/kesempatan kerja yang terbatas dalam artian tidak sebanding antara jumlah lowongan kerja dengan penambahan jumlah angkatan kerja.
2. Masih banyak pencari kerja yang tidak membekali diri dengan keterampilan sesuai kebutuhan bursa kerja.

Solusi/strategi yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan dunia kerja melalui proses pemagangan dalam negeri.
2. Melakukan pembinaan secara berkala kepada organisasi serikat pekerja/serikat buruh, pekerja dan pengusaha.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja.
4. Peningkatan kapasitas instruktur melalui sertifikasi/uji kompetensi instruktur.
5. Membuka akses kesempatan kerja ke luar negeri melalui program pemagangan kerja luar negeri sektor formal.
6. Pelaksanaan *Job Fair* bagi pencari kerja.

4. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total seluruh penduduk di suatu wilayah tertentu. Penghitungan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah didapatkan dari penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada tabel 3.4 terlihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Banggai tahun 2022 sebesar 7,33%, dari target sebesar 6,70% dengan capaian kinerja sebesar 90,59%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 53,40%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,50 point pada tahun 2022 dimana capaian kinerja indikator angka kemiskinan tahun 2021 menunjukkan kinerja yaitu sebesar 111,82% karena terealisasi sebesar 7,83% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sebesar 8,97-8,88%.

Pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Banggai mencapai 28.550 orang (7,33%), berkurang sebesar 1.550 ribu orang dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 30.100 ribu orang (7,83%).

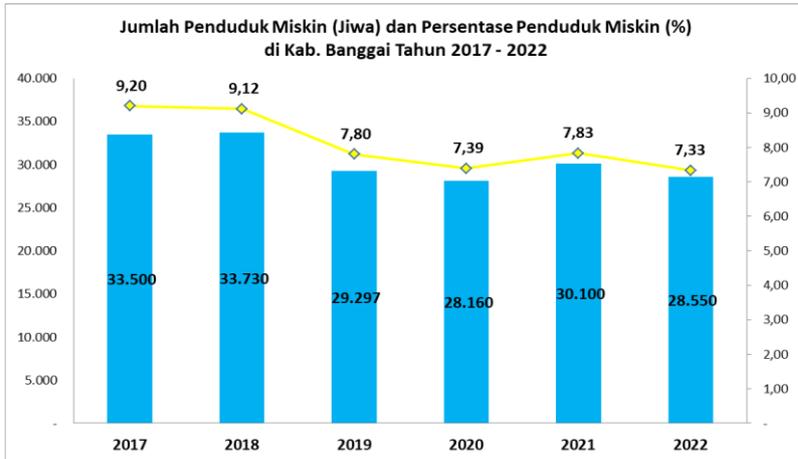
Tabel 3.8
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Banggai, 2014-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	352.840	33.500	9,20
2018	373.695	33.730	9,12
2019	395.700	29.297	7,80

2020	417.863	28.160	7,39
2021	431.639	30.100	7,83
2022	457.335	28.550	7,33

Sumber : BPS Kabupaten Banggai

Grafik 3.15



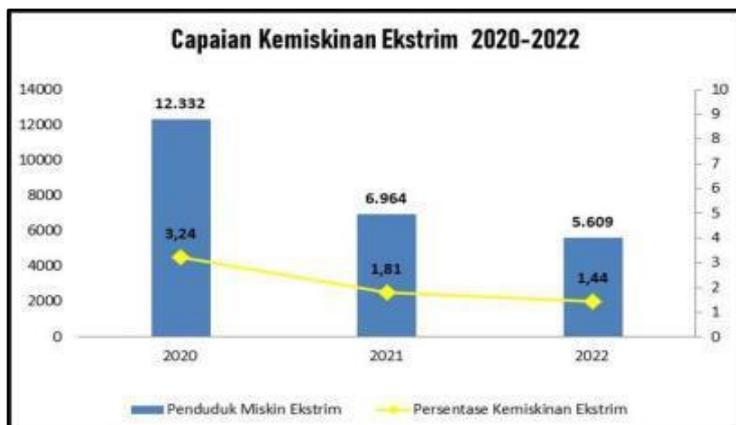
- Penduduk yang pengeluaran perkapitanya di bawah garis kemiskinan ekstrem (GKE) dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrem.

▪ Kemiskinan ekstrem diukur dengan menggunakan “Absolute Proverty Measure” menggunakan standar garis kemiskinan World Bank yang setara dengan 1,99 US\$ Purcousing Power Pority (PPP) perhari atau setara dengan Rp. 322.170/bln atau Rp. 10.739/hari.

- Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Banggai tahun 2022 sebesar Rp. 457.335/bln atau Rp. 15.244/hari.

Kemiskinan di Kabupaten Banggai mengalami fluktuasi, terlihat bahwa tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 akibat adanya pandemi covid-19, tren kemiskinan kembali meningkat. namun pada tahun 2022 kembali menurun dikarenakan pandemi covid-19 yang semakin mereda dan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat juga.

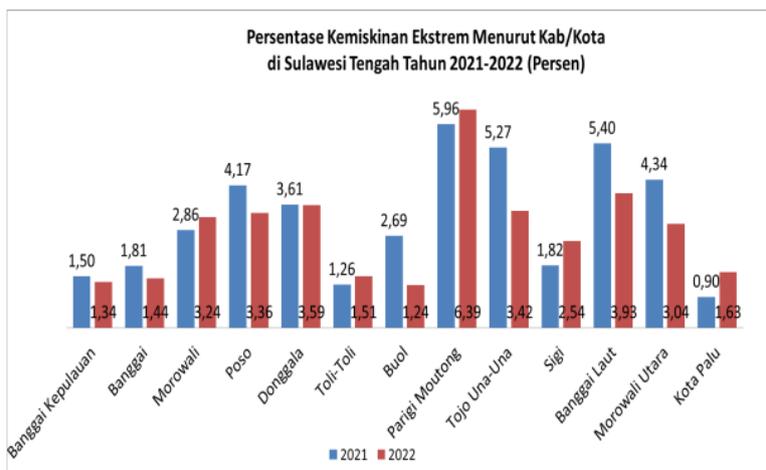
Grafik 3.16



Persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah Penduduk Miskin ekstrem di Kabupaten Banggai terus mengalami penurunan dari 3,24% atau 12.332 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1,44% atau 5.609 jiwa di tahun 2022.

Pengurangan persentase dan penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,8% atau 6.723 jiwa.

Grafik 3.17



Pada grafik 3.17 persentase kemiskinan ekstrem menurut kab/kota di Sulawesi Tengah tahun 2021-2022 (persen) sebagai berikut :

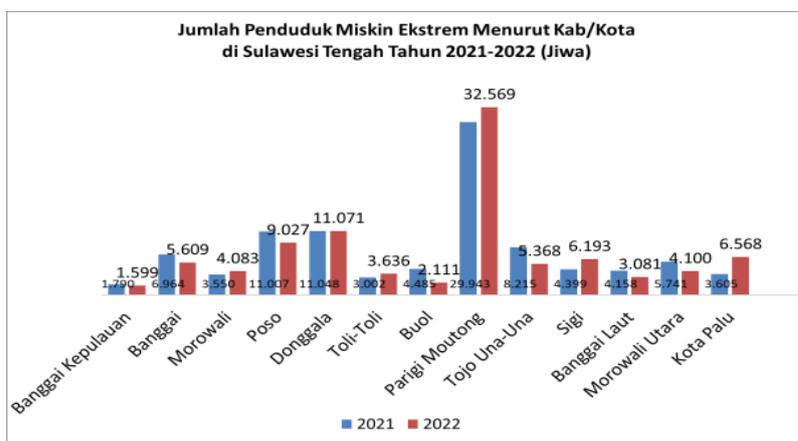
- Tahun 2022 terdapat 4 Kabupaten dan 1 Kota yang mengalami

peningkatan angka kemiskinan ekstrem. 8 kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan.

- Kabupaten Banggai mengalami penurunan persentase penduduk miskin ekstrem dari 1.81% di tahun 2021 menjadi 1,44% di tahun 2022, dan berada di urutan ketiga terendah setelah Kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan.

Untuk jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kab/kota di Sulawesi Tengah tahun 2021-2022 (jiwa) sebagai berikut :

Grafik 3.18



- Jumlah penduduk miskin ekstrem terbesar yakni Kabupaten Parigi Moutong sedangkan yang terendah yakni Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Kabupaten Banggai

mengalami penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem yakni dari 6.964 jiwa di tahun 2021 menjadi 5.609 jiwa di tahun 2022 dan berada di urutan ke enam tertinggi.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai pada tahun 2022 mencapai 28.550 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1.550 ribu orang dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 30.100 ribu orang.

Pada tabel 3.9 terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Banggai terendah kedua setelah Kota Palu. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Banggai sebanyak 28,55 ribu orang menempati urutan ke-delapan. Dari

tabel diatas juga menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan Banggai lebih rendah dibandingkan Garis Kemiskinan Sulawesi Tengah. Garis Kemiskinan tertinggi di Kota Palu sebesar Rp 604.280, disusul kemudian Poso sebesar Rp 561.276. Kabupaten Banggai sendiri memiliki garis kemiskinan sebesar Rp 457.335 berada diurutan ke tujuh di Sulawesi Tengah tepat di bawah Parigi Moutong.

Tabel 3.9

**DATA KEMISKINAN KABUPATEN /KOTA TAHUN 2022
DI SEULAWESI TENGAH**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P ₁	P ₂	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Banggai Kepulauan	16,07	13,44	1,79	0,35	396.904
2	Banggai	28,55	7,33	1,20	0,28	457.335
3	Morowali	15,86	12,58	2,03	0,54	507.523
4	Poso	40,78	15,18	2,40	0,66	561.276
5	Donggala	50,22	16,30	2,82	0,72	395.028
6	Toli-Toli	30,61	12,74	1,53	0,30	378.317
7	Buol	21,84	12,85	1,79	0,34	410.824
8	Parigi Moutong	74,60	14,63	3,84	1,37	495.623
9	Tojo Una-Una	25,33	16,12	2,80	0,78	547.910
10	Sigi	29,94	12,30	2,01	0,48	409.679
11	Banggai Laut	10,32	13,17	2,23	0,61	384.686
12	Morowali Utara	17,49	12,97	2,18	0,65	519.441
13	Kota Palu	26,75	6,63	0,94	0,25	604.280
SULAWESI TENGAH		388,36	12,33	2,41	0,68	530.251

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, melalui berbagai program dan inovasi yang tepat sasaran. Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya keterpaduan antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan.

Upaya/strategi penanggulangan kemiskinan di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai melalui program penanggulangan kemiskinan dengan inovasi **“Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi (Tumis Ikan Teri)”** meliputi :

1. Strategi pengurangan beban pengeluaran
 - Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat
 - Bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu
 - Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa
 - Bantuan cadangan pemerintah
2. Strategi peningkatan pendapatan
 - Bantuan pelatihan usaha mikro

- BUMDES 500 jt/desa
 - Program Satu Juta Satu Kekarangan
 - Read-Si/IPDMIP
3. Strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan
- Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni
 - Penyediaan air minum dan sanitasi
 - Bantuan sosial

Karakteristik kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banggai adalah :

1. Pendidikan Rendah
 - Pendidikan kepala rumah tangga umumnya hanya tidak tamat SD/ sederajat, tidak bersekolah maupun hanya tamatan SD/ sederajat.
 - Terdapat kepala rumah tangga perempuan
2. Minim akses pekerjaan layak
 - Bekerja sebagai petani, nelayan dan pekerja lepas
3. Kepemilikan rumah
 - Terdapat rumah tangga yang masih menumpang
 - Spesifikasi rumah (jenis atap, jenis dinding, dan jenis lantai) yang belum layak
4. Akses air minum/sanitasi
 - Terdapat rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang tidak layak
5. Akses listrik
 - Terdapat rumah tangga sumber penerangan umum tidak ada listrik atau listrik Bersama/cantolan

5. Gini Rasio

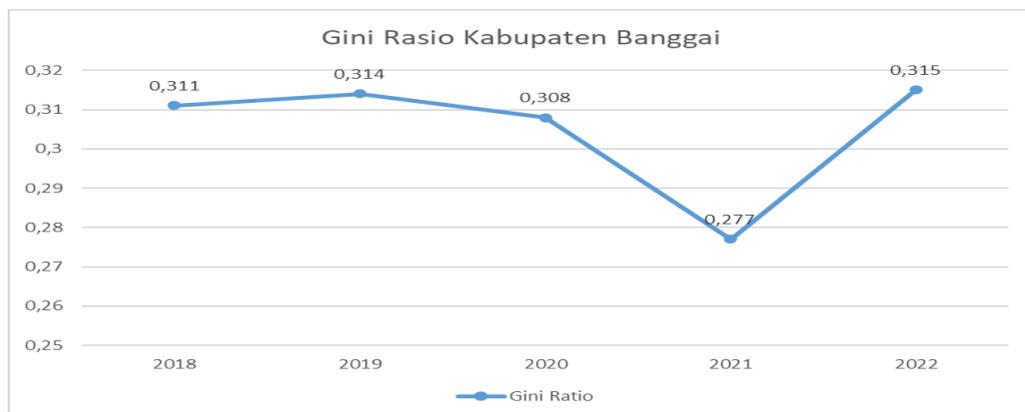
Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan tidak merata sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Berdasarkan Tabel 3.4 gini ratio Kabupaten Banggai sebesar 0,315 belum mencapai target sebesar 0,297 dalam artian melebihi target tahun 2022 sehingga memperoleh capaian sebesar 93,94%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 gini

ratio Kabupaten Banggai sebesar 0,277 adanya kenaikan sebesar 0,038 point. Gini Ratio pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari gini rasio pada tahun 2021 sehingga menunjukkan bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Banggai masih belum merata, hal tersebut seiring dengan angka penduduk miskin di Kabupaten Banggai yang masih besar akibat dari pandemi covid 19 yang mengakibatkan dunia usaha di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) masih dalam tahap pemulihan sehingga mengakibatkan masih minimnya pendapatan masyarakat.

Terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perbedaan kandungan sumberdaya alam; perbedaan kondisi geografis; kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Grafik 3.19
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banggai, 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gini rasio Kabupaten Banggai jika dibandingkan dengan Gini rasio Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah sebagai berikut :

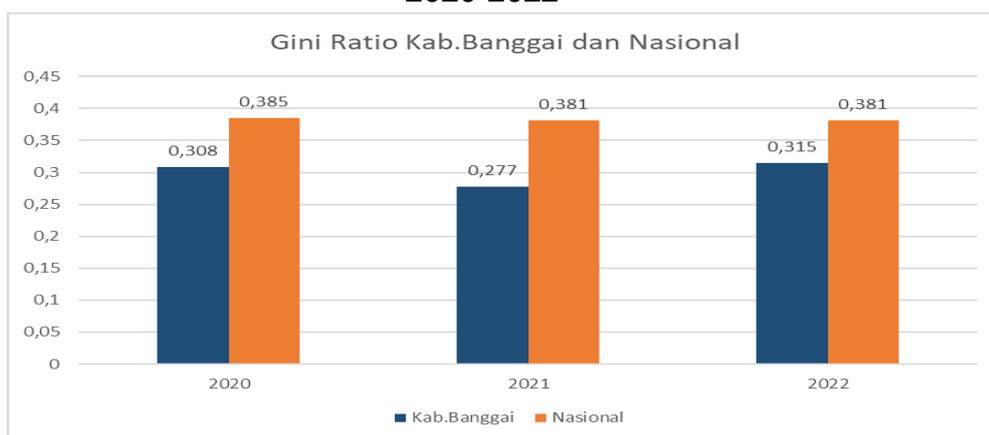
Tabel 3.10
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah, 2020-2022

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Sulawesi Tengah	0,326	0,316	0,308
Banggai Kepulauan	0,298	0,279	0,280
Banggai	0,308	0,277	0,315
Morowali	0,290	0,297	0,285
Poso	0,311	0,270	0,256
Donggala	0,276	0,261	0,280
Tolitoli	0,336	0,349	0,295
Buol	0,289	0,321	0,266
Parigi Moutong	0,293	0,287	0,279
Tojo Una-una	0,256	0,247	0,250
Sigi	0,281	0,291	0,265
Banggai Laut	0,251	0,251	0,247
Morowali Utara	0,319	0,301	0,269
Kota Palu	0,304	0,308	0,355

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gini rasio Kabupaten Banggai jika dibandingkan dengan Gini rasio Nasional sebagai berikut :

Grafik 3.20
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Nasional, 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Adapun langkah-langkah untuk pencapaian ditahun mendatang antara lain :

1. Memperbaiki layanan Kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan

2. Menyediakan lapangan pekerjaan yang merata
3. Memperbaiki akses transportasi pada wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Banggai guna meningkatkan pendapatan perkapita penduduk secara merata.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera”, yaitu :

Tabel 3.11
Program, Anggaran dan Realisasi
Yang Mendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pengelolaan Pendidikan	97.868.609.830,00	34.002.480.959,00	34,74
Pengembangan Kurikulum	65.382.999,00	30.451.750,00	46,57
Pengendalian Perizinan Pendidikan	35.938.197,00	28.992.800,00	80,67
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.353.500,00	6.353.500,00	100,00
Pengembangan Bahasa Dan Sastra	23.843.000,00	23.361.000,00	97,98
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	225.434.602.014,00	162.398.269.908,00	72,04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.980.764.190,00	6.803.862.190,00	97,47
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	644.566.860,00	479.178.529,00	74,34
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	793.228.800,00	728.135.900,00	91,79
Pemberdayaan Sosial	3.308.760.552,00	3.238.510.465,00	97,88
Rehabilitasi Sosial	1.198.264.600,00	1.154.293.783,00	96,33
Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.043.017.155,00	6.017.437.155,00	99,58
Penanganan Bencana	611.945.900,00	603.575.640,00	98,63
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	238.962.183,00	233.256.500,00	97,61
Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	573.842.815,00	544.921.545,00	94,96
Penempatan Tenaga Kerja	67.976.500,00	49.347.200,00	72,59
Hubungan Industrial	1.514.042.650,00	1.467.566.784,00	96,93
Pengarus utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	126.403.150,00	104.655.250,00	82,79
Perlindungan Perempuan	120.499.000,00	112.970.500,00	93,75
Pemenuhan Hak Anak (Pha)	82.252.900,00	77.581.280,00	94,32
Perlindungan Khusus Anak	10.867.000,00	10.480.000,00	96,44
Pengendalian Penduduk	243.238.600,00	231.025.286,00	94,98
Pembinaan Keluarga	5.177.340.632,00	4.565.971.285,00	88,19

Berencana (K)			
Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.746.648.000,00	1.892.698.512,00	68,91
Jumlah	353.917.352.027,00	224.805.377.721,00	63,52

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai 2022

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 102,60% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 224.805.377.721,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 353.917.352.027,00 atau sebesar 63,52%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektifitas yang dicapai sebesar 161,52%, dan tingkat efisiensi sebesar 39,08%.

Tabel. 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	%	-	-	-	3,7	4,35	117,57	5,7	76,31
Rata-rata capaian kinerja							117,57		76,31

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (data diolah)

Dari tabel 3.12 target RPJMD dari Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2022 sebesar 3,7% dan terealisasi sebesar 4,35%, sehingga dapat dikatakan Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB melebihi target RPJMD tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 117,57%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 76,31%

Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM dilihat dari Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Untuk yang termasuk dalam perdagangan besar yaitu kegiatan ekspor dan yang termasuk dalam perdagangan eceran yaitu pada koperasi, UMKM dan IKM.

Untuk data terkait daftar eksportir SKA yang ada di Kabupaten Banggai selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Daftar Eksportir SKA
Kabupaten Banggai Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Jenis Komoditi	Jumlah	Jumlah SKA	Negara Tujuan
1	PT. Panca Amara Utama	Amonia	80027074.129 TNE	66 SKA	Korea, Afrika Selatan, Madagaskar, Jepang, India, China
2	PT. Donggi Senoro Lng	Natural Gas	509747.149 TNE	9 SKA	Korea
3	PT. Sasl And Sons Indonesia	Tepung dan Minyak Kelapa	2461765.09 KGM	122 SKA	Amerika, Kanada, Brazil, Australia
4	PT. Banggai Indo Gemilang	Gurita	21111 KGM	1 SKA	Amerika
Jumlah				198 SKA	

Sumber : Disdagrin Kab.Banggai, (data diolah)



Untuk data perdagangan eceran Kabupaten Banggai dapat dilihat pada link/barcode berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1NIRPuJfxG77PzerOw8frQEHu_mp2OY40?usp=sharing

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru”, yaitu:

Tabel. 3.14
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2022
Yang Mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	150.404.000,00	94.491.100,00	62,82
2	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	121.214.350,00	89.469.350,00	73,81
3	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	61.561.550,00	46.386.550,00	75,35
4	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	557.314.300,00	497.840.627,00	89,33
5	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperas	279.088.350,00	12.665.850,00	4,54
6	Pemberdayaan Usaha	1.679.475.850,00	1.631.065.437,00	97,12

	Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)			
7	Pengembangan Umkm	486.056.800,00	474.331.988,00	97,59
8	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	218.979.550,00	158.650.310,00	72,45
9	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.596.778.383,00	1.042.284.250,00	65,27
10	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	218.829.200,00	183.234.280,00	83,73
11	Pengembangan Ekspor	216.729.200,00	182.567.580,00	84,24
12	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	858.103.985,00	756.305.320,00	88,14
13	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	814.000,00	0,00	0,00
14	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.196.360.948,00	984.512.919,00	82,29
15	Pengendalian Izin Usaha Industri	24.208.500,00	18.886.880,00	78,02
16	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.308.000,00	16.640.000,00	78,09
	Jumlah	7.687.226.966,00	6.189.332.441,00	80,51

Sumber : BPKAD Kab. Banggai

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perdagangan, industri rumah tangga, koperasi dan umkm serta pertumbuhan wirausaha baru diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 117,57% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 6.189.332.441,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.687.226.966,00 atau sebesar 80,51%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektifitas yang dicapai sebesar 146,03%, dan tingkat efisiensi sebesar 37,06%.

Tabel. 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	%	-	-	-	37,80	40,54	107,25	75,00	54,05
Rata-rata capaian kinerja								107,25		54,05

Sumber : Dinas PMD Kab. Banggai,
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel 3.15 terlihat bahwa realisasi terhadap indikator persentase desa maju berdasarkan IDM sebesar 40,54% melebihi target sebesar 37,80%, dengan capaian kinerja sebesar 107,25%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 54,05%.

Indeks desa membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan.

Berdasarkan dari data hasil survey Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022, Kabupaten Banggai memperoleh nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,7012 atau berada pada kategori desa berkembang, sedangkan tahun 2021, untuk indikator kinerja indeks desa membangun realisasinya sebesar 0,6837, jika dibandingkan antara tahun 2021 dan 2020 hanya bertambah 0,2 point, jadi tidak terdapat perubahan yang signifikan. Dimana dari 23 kecamatan terdapat 12 kecamatan masuk dalam kategori desa maju dan 11 Kecamatan masuk dalam kategori desa berkembang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.16
 Nilai Rata-Rata dan Status IDM Kecamatan di Kabupaten Banggai
 Tahun 2022

No	Kecamatan	Nilai Rata-Rata IDM 2022 Kecamatan	Status IDM Kecamatan 2022
1	Luwuk Selatan	0,8021	Maju
2	Mantoh	0,7847	Maju
3	Luwuk	0,7712	Maju
4	Batui	0,7654	Maju
5	Batui Selatan	0,7525	Maju
6	Nambo	0,7441	Maju
7	Moilong	0,7374	Maju
8	Toili Barat	0,7339	Maju
9	Masama	0,7332	Maju
10	Balantak Utara	0,7203	Maju
11	Toili	0,7202	Maju
12	Balantak Selatan	0,7111	Maju
13	Lobu	0,7009	Berkembang
14	Luwuk Timur	0,6882	Berkembang
15	Kintom	0,6881	Berkembang
16	Luwuk Utara	0,6835	Berkembang
17	Nuhon	0,6825	Berkembang

18	Bualemo	0,6801	Berkembang
19	Lamala	0,6732	Berkembang
20	Bunta	0,6664	Berkembang
21	Simpang Raya	0,6663	Berkembang
22	Pagimana	0,6573	Berkembang
23	Balantak	0,6463	Berkembang

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Tabel. 3.17
Status Perkembangan Desa di Kabupaten Banggai, 2022

Status Desa / Village Status	Jumlah Kelurahan / Desa / Number of Village			
	2021	%	2022	%
Desa Mandiri	5	1,71%	7	2,40%
Desa Maju	89	30,58%	118	40,54%
Desa Berkembang	191	65,63%	163	56,01%
Desa Tertinggal	6	2,06%	3	1,03%
Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0
Jumlah Desa	291			

Sumber : Dinas PMD Kab.Banggai, (Data Diolah)

Dari tabel 3.17 status desa di Kabupaten Banggai dari tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi perkembangan yang dimana adanya peningkatan status desa mandiri dan desa maju serta untuk status desa berkembang dan desa tertinggal yang mengalami penurunan.

Bila dibandingkan IDM Kabupaten Banggai dengan IDM Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banggai lebih tinggi berada pada ranking pertama dengan nilai IDM sebesar 0,7012 dari Kabupaten di sekitar Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan IDM Banggai dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi tengah, 2022

Rank	Prov/Kab/Kota	Nilai Rata-rata IDM	Status IDM
1	Banggai	0.7012	Berkembang
2	Parigi Moutong	0.6990	Berkembang
3	Donggala	0.6911	Berkembang
4	Buol	0.6844	Berkembang
5	Poso	0.6687	Berkembang
6	Toili-Toli	0.6648	Berkembang
7	Sigi	0.6567	Berkembang
8	Morowali	0.6528	Berkembang

9	Morowali Utara	0.6504	Berkembang
10	Banggai Kepulauan	0.6378	Berkembang
11	Banggai Laut	0.6261	Berkembang
12	Tojo Una-Una	0.6239	Berkembang

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bila dibandingkan IDM Kabupaten Banggai dengan IDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banggai sebesar 0,7012 desa berkembang lebih tinggi 0,0307 point dari nilai IDM Sulawesi Tengah yaitu 0,6705 status berkembang dan lebih tinggi 0,0288 point dari nilai IDM Nasional sebesar 0,6724, sebagai berikut :

Grafik 3.21

Perbandingan IDM Banggai dengan Provinsi dan Nasional, 2022



Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kemajuan dan kemandirian desa sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan antara pemerintah desa dengan kewenangan desa dan keuangan desanya mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Kendala atau permasalahan yang terjadi dalam perkembangan dan kemajuan status desa di Kabupaten banggai antara lain :

- Belum optimalnya pemahaman aparatur dan lembaga yang ada di desa terutama dalam hal memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa dan aset desa sehingga masih ada desa yang terlambat dalam proses penyusunan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan dan aset desa secara tepat waktu dan tepat isi yang kemudian dapat mempengaruhi terhadap pencapaian target sasaran strategis Dinas PMD.

- Sering terjadinya pergantian aparatur pemerintah desa, sehingga memperlambat dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Olehnya itu Dinas PMD menjadi lebih sering memberikan sosialisasi atau pelatihan terus menerus sedangkan anggaran untuk pelatihan sangat terbatas.
- Dalam kegiatan pembinaan APBDesa semestinya lebih diintenskan pelaksanaan rakor dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Camat, Kades dan aparat desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli maupun dinas terkait, hal ini sangat membutuhkan suport anggaran untuk Rakor dan Sosialisasi terkait permasalahan dan hambatan di desa dan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terbaru baik peraturan dari Pusat, Provinsi maupun dari Kabupaten.
- Dalam hal pembinaan kelembagaan di desa tahun 2022 karena keterbatasan anggaran, sehingga ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan seperti kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang mana kegiatan tersebut melibatkan peran aktif seluruh lembaga-lembaga yang ada didesa dan Tim Pengerak PKK.
- Masalah pengaturan organisasi, banyak BUMDesa yang kurang berkembang karena karena kurang pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDesa, meskipun kepengurusan sudah dibentuk, namun pada implementasinya pengurus BUMDesa belum bisa menyelesaikan tanggungjawabnya dengan baik.
- Dalam menemukan dan mengembangkan potensi desa, banyak desa yang kurang mengenal potensi desa yang dapat dikembangkan melalui BUMDesa bersama atau program kerja sama antar desa.
- BUMDesa yang pengelolaannya sudah baik masih kesulitan dalam perihal promosi,oleh karena itu kepengurusan BUMDesa harus benar mampu melihat peluang dan mencari cara untuk melakukan promosi.
- Teknologi Tepat Guna yang sudah diciptakan oleh kelompok masyarakat belum dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

Strategi yang dilakukan dalam perkembangan dan kemajuan status desa di Kabupaten Banggai antara lain :

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Efektif Dan Efisien agar desa tertib administrasi dengan Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi

peraturan yang berkaitan dengan keuangan dan aset desa serta kelembagaan di desa.

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa dan anggaran dana desa agar desa tepat waktu dalam penyampaiannya.
- Penguatan kapasitas pengurus BUMDes agar bisa mengelola potensi yang dimiliki desa pembinaan ke desa terkait pengembangan BUMDesa dengan melakukan pemetaan potensi ekonomi desa, diawali dengan dialog dengan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan pelaku wirausaha desa lainnya tentang potensi desa, merancang inovasi dan pengembangan produk yang dapat dikelola oleh BUMDesa, sehingga keberadaan usaha BUMDesa benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan menjadi pesaing usaha yang telah ada di desa.
- Memberikan Sosialisasi terkait pentingnya BUMdesa bagi perekonomian desa serta mendorong desa agar memberikan penyertaan modal ke BUMDesa agar usaha BUMDesa dapat berjalan sesuai dengan unit usaha yang tertuang dalam AD/ART.
- Teknologi yang sudah diciptakan oleh kelompok masyarakat harus dipromosikan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga (BUMDesa, dinas terkait, swasta) agar teknologi tersebut dapat dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut.
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa dan pendayagunaan profil desa dengan cara jemput bola agar desa dapat memaksimalkan penginputan epdeskel dan pendayagunaan prodeskel secara online.
- Meningkatkan pembinaan yang berkelanjutan kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Sosialisasi terkait permasalahan dan hambatan di desa maupun tentang peraturan-peraturan yang terbaru baik peraturan dari Pusat, Provinsi maupun dari Kabupaten agar desa lebih maju dan mandiri.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM”, yaitu:

Tabel. 3.19
 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2022
 Yang Mendukung sasaran Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Penataan Desa	39.648.000	37.915.800	95,63
2	Peningkatan Kerjasama Desa	65.019.000	64.866.000	99,76
3	Administrasi Pemerintahan Desa	22.378.342.366	21.765.384.540	97,26
4	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.572.077.200	1.389.065.317	88,36
Jumlah		24.055.086.566	23.257.231.657	96,68

Sumber : BPKAD Kab.Banggai, 2022

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 107,25% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 23.257.231.657,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 24.055.086.566,00 atau sebesar 96,68%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 110,93%, dan tingkat efisiensi sebesar 10,57%.

Tabel. 3.20
 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
 Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	%	-	-	-	70,00	71,91	102,73	80,00	89,89
Rata-rata capaian kinerja							102,73		89,89

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banggai, (data diolah)

Pencapaian atas sasaran tersedianya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, layak dan merata untuk penanggulangan

kemiskinan dan konektivitas dengan indikator persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik diperoleh capaian kinerja sebesar 102,73% dengan kategori baik sekali, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 tercapai sebesar 89,89% dengan kategori baik.

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Ketersediaan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan produktif, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan pencapaian infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai tahun 2022, yaitu :

Tabel 3.21
Capaian Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik Tahun 2022

No	Infrastruktur Dasar dan wilayah	Realisasi
1	Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	77,00%
2	Rumah Tangga dengan akses air minum layak	88,69%
3	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	74,65%
4	Bangunan Negara berfungsi baik	86,00%
5	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	63,69%
6	Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	33,33%
7	Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	80,00%
Rata-rata capaian		71,91%

Sumber : Dinas PUPR

Tabel 3.22
Infrastruktur dasar dan wilayah di Kabupaten Banggai, 2022

No	Infrastruktur Dasar dan wilayah	Jumlah Total	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Prasarana Jalan	1.178,46 Km	464,800 Km	347,195 Km	367,015 Km
2	Drainase Kabupaten	169,44 Km	150,163 Km	-	39,068 Km
3	Irigasi Kabupaten	143,670 Km	75,153 Km	39,140 Km	33,562 Km
4	Jumlah Bangunan Pemerintah Kabupaten	155 Unit	105 Unit	-	50 Unit
5	Jumlah Jembatan di Kabupaten	265 Unit	229 Unit	-	36 Unit

Sumber : Dinas PUPR

- Dibidang Pengairan (irigasi), pemeliharaan saluran irigasi telah dilakukan secara sistematis sejak dulu oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat.



- Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan diperlukan untuk



menentukan keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup di mukabumi ini. Dalam segala macam kegiatan manusia, air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai

kegiatan, seperti keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup dibumi ini.

- Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dapat diperoleh jika para pelaku bidang jasa konstruksi memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai bidang pekerjaannya. Dalam pembangunan infrastruktur, peran tenaga kerja konstruksi menjadi sangat penting. Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki 2017 tentang Jasa Konstruksi, Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan dibidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesidan keahlian.

Peran tenaga kerja konstruksi sangat penting dalam mendukung program prioritas nasional untuk membangun infrastruktur yang tepat waktu dan berkualitas guna mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan Penyiapan SDM Konstruksi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik

lokal, regional maupun nasional Sektor konstruksi di Indonesia sendiri di perkirakan bernilai Rp. 446 triliun atau menyumbang sekitar 14,3% dari PDB Indonesia. Setidaknya dari setiap Rp. 1 Triliun pembangunan infrastruktur dibutuhkan ±14.000 tenaga kerja.



- Perencanaan penataan ruang merupakan salahsatu unsur dalam pembangunan suatu daerah yang masih harus mendapatkan penanganan serius. Berbagai masalah perkotaan yang timbul seperti kemacetan, polusi udara, Pedagang kaki lima dan permasalahan kota lainnya merupakan dampak dari

perbuatan manusia itu sendiri yang bertindak tanpa atau tidak sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemadu serasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan

Dalam Undang undang No.26 tahun 2007 mengamanatkan perlunya suatu perencanaan yang berbasis penatagunaan ruang yang mengharuskan setiap daerah menyusun konsep ketata ruangan agar pembangunan yang direncanakan memiliki pondasi yang kuat dan terarah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Kabupaten Banggai dengan posisinya yang strategis, serta kondisi alamnya yang relatif nyaman takluput dari permasalahan pembangunan perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah rencana pembangunan yang dibuat,tidak jarang mengalami ketidaksesuaian dengan

pemanfaatan ruangnya. Oleh karena itu pembangunan suatu daerah perlu adanya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, dalam tercapainya sasaran tersedianya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, layak dan merata untuk penanggulangan kemiskinan dan konektivitas yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program yang ada, seperti pembebasan lahan yang sangat sulit untuk lokasi pekerjaan.
2. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum penetapan sasaran pekerjaan/kegiatan.
3. Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh kurangnya alat berat yang digunakan, dikarenakan pekerjaan dilaksanakan dalam waktu bersamaan sehingga jumlah kegiatan tidak sebanding dengan jumlah alat yang ada. Dimana sebagian besar penyedia belum memiliki alat berat sendiri, sementara alat berat yang disewakan terbatas jumlahnya. Untuk meminimalisir keadaan ini diperlukan pengaturan jadwal dalam hal pelaksanaan pekerjaan.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas”, yaitu:

Tabel. 3.23
 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2022
 Yang Mendukung sasaran Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan
 Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan
 Kemiskinan dan Konektivitas

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	15.075.977.850,00	14.114.163.792,00	93,62
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.247.806.841,00	14.300.599.352,00	82,91
3	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	960.661.086,00	547.815.449,00	57,02
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.646.813.000,00	4.536.527.250,00	97,63

5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	26.005.597.455,00	25.528.355.600,00	98,16
6	Pengembangan Permukiman	11.781.342.621,00	11.641.264.400,00	98,81
7	Penataan Bangunan Gedung	74.740.579.382,00	25.889.086.197,00	34,64
8	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	8.125.799.013,00	7.694.209.580,00	94,69
9	Penyelenggaraan Jalan	127.844.065.083,00	121.432.459.148,00	94,98
10	Pengembangan Jasa Konstruksi	688.805.390,00	289.766.300,00	42,07
11	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.669.871.630,00	2.104.993.156,00	78,84
12	Pengembangan Perumahan	80.363.500,00	70.367.500,00	87,56
13	Kawasan Permukiman	9.122.534.767,00	8.988.605.390,00	98,53
14	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	5.542.327.613,00	5.536.301.552,00	99,89
15	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.373.363.384,00	10.872.427.967,00	95,60
16	Pengelolaan Pelayaran	60.822.500,00	58.873.300,00	96,80
17	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	723.534.900,00	718.452.208,00	99,30
18	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.870.272.500,00	1.826.968.326,00	97,68
Jumlah		318.560.538.515,00	256.151.236.467,00	80,41

Sumber : BPKAD Kab.Banggai

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 102,73% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 256.151.236.467,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 318.560.538,00 atau sebesar 80,41%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektifitas yang dicapai sebesar 127,76%, dan tingkat efisiensi sebesar 22,32%.

Tabel. 3.24
 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
 Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda
 dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori	-	-	-	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja								Tinggi		Tinggi

Sumber : BPBD Kab.Banggai

Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana.

Berdasarkan tabel 3.24 indeks ketahanan daerah untuk tahun 2022 memperoleh skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 1,24 dengan kelas kategori tinggi, dengan capaian kinerja yang tinggi atau 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian kinerja tinggi atau 100%.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu dengan mengisi kuisisioner 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah sendiri, terdapat 7 prioritas dan 71 indikator. Setiap indikator, diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci. 7 prioritas tersebut terdiri dari :

- Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
- Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Pada Tabel dibawah ini menunjukan nilai Kabupaten Banggai Pada ke-7 prioritas dari penilaian indeks ketahanan daerah, yaitu :

Tabel 3.25
 Nilai IKD Kabupaten Banggai Berdasarkan 7 prioritas

No	Prioritas	Nilai
1	Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,34
2	Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,20
3	Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik	0,20
4	Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,20
5	Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,00
6	Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,10
7	Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20
Nilai Indeks Ketahanan Daerah		1,24

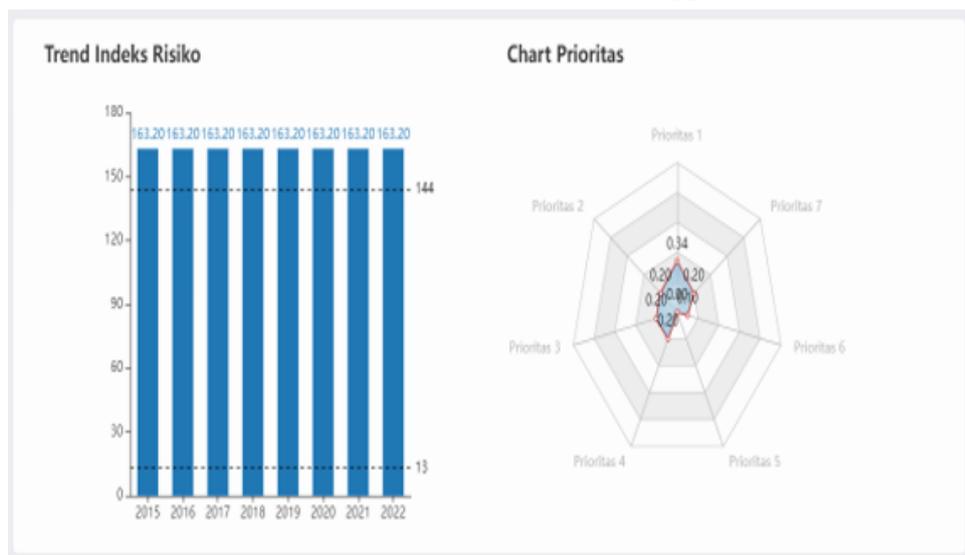
Sumber : BPBD Kab.Banggai, 2022,(data diolah)

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah yaitu :

- Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

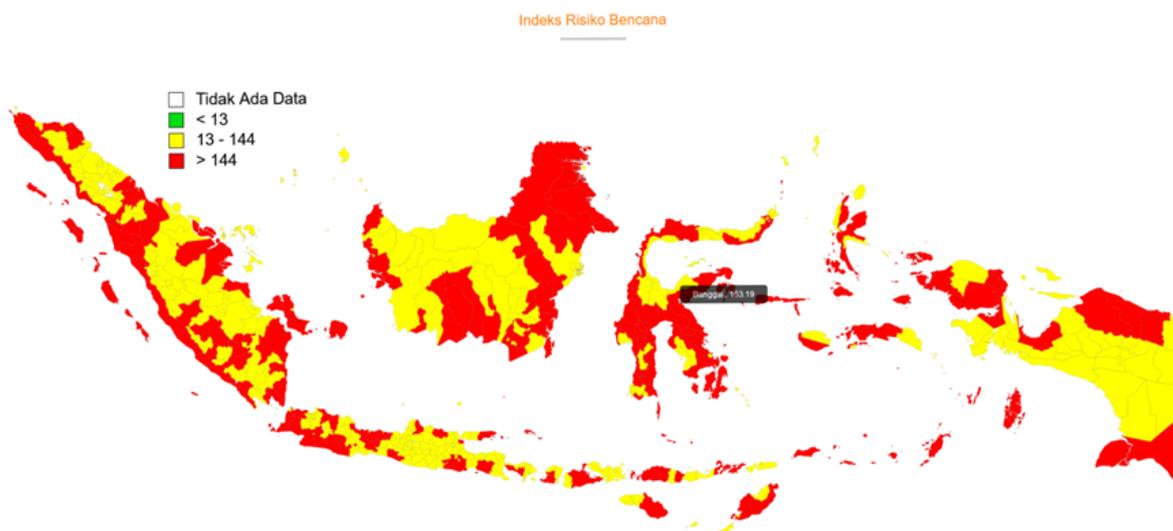
Sedangkan Pada gambar di bawah ini menunjukkan indeks resiko bencana seluruh wilayah indonesia dan juga termasuk kabupaten Banggai di dalamnya. Bahwa indeks resiko bencana Kabupaten Banggai berada di zona merah atau tinggi dengan nilai 163,20.

Grafik. 3.22
 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banggai 2022



Sumber : BPBD Kab.Banggai

Gambar 3.4
Gambar Indeks Risiko Bencana Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2022



Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

Adapun Klasifikasi nilai indeks resiko bencana, sesuai dilihat dari indeks risiko bencana, sebagai berikut :

	= < 13 (Rendah)
	= 13 – 144 (Sedang)
	= > 144 (Tinggi)

Program yang mendukung sasaran “Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana”, sebagai berikut :

Tabel 3.26
Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.742.423.900,00	1.553.405.647,00	89,15
2	Penanggulangan Bencana	2.724.240.650,00	2.638.522.681,00	96,85
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	367.393.500,00	354.815.245,00	96,58
	Jumlah	4.834.058.050,00	4.546.743.573,00	94,06

Sumber : BPKAD Kab.Banggai 2022, (data diolah)

Beradsarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.546.743.573,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.834.058.050,00 atau sebesar 94,06%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 106,31%, dan tingkat efisiensi sebesar 5,94%.

Tabel. 3.27
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB	%	-	-	-	33,23	40,13	120,76	35,99	111,50
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	-	-	-	86,64	85,73	98,95	90,00	95,25
Rata-rata capaian kinerja								109,85		103,37

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, (data diolah)
*) BKP Kementan

Pencapaian atas sasaran meningkatnya investasi dan pengelolaan potensi pertanian, perikanan dan kelautan serta pertambangan untuk mendukung perekonomian daerah terhadap kedua indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 109,85% dengan kategori “baik sekali”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh rata-rata capaian sebesar 103,37% kategori “baik sekali”.

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB

Dari tabel 3.27 Target RPJMD dari Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2022 sebesar 33,23% dan terealisasi sebesar 40,13%, dengan capaian kinerja sebesar 120,76%. Dapat dikatakan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan terhadap PDRB melebihi target RPJMD tahun 2022. Kontribusi tersebut melebihi target dikarenakan ketiga sektor ini mengalami pertumbuhan positif

di Kabupaten Banggai selama tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 35,99 diperoleh capaian sebesar 111,50%. Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB diperoleh dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,47% dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalan sebesar 21,66%.

Tabel 3.28
Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan
di Kabupaten Banggai

Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
Jagung	Bawang Merah	Kelapa Sawit	a. Ternak Besar meliputi :	a. Perikanan Tangkap meliputi :
Ubi Kayu	Cabai Besar	Kelapa	- Sapi	- Ikan Cakalang
Ubi Jalar	Kentang	Cengkeh	- Kerbau	- Tongkol
Kacang Tanah	Bawang Putih	Kopi	- Kuda	- Tuna
Kacang Hijau	Petsai	Kakao	b. Ternak Kecil meliputi :	- Udang
	Tomat	Jambu Menté	- Kambing	b. Perikanan Budidaya meliputi :
		Kapuk	- Domba	- Jaring apung laut
		Tembakau	- Babi	- Jaring apung tawar
		Kemiri		- Jarring tangkap tawar
		Sagu		- Keramba
		Pala		- Kolam air deras
		Lada		- Kolam air tenang
				- Minapadi sawah
				- Rumput Laut
				- Tambak intensif
				- Tambak sederhana
				- Tambak semi intensi

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menentukan perekonomian Kabupaten Banggai, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam. Dimana dari keseluruhan desa/kelurahan di Kabupaten Banggai sekitar 93,98% merupakan potensi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

Komoditas yang diukur di sektor pertanian dan perikanan antara lain komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Berdasarkan hasil pencapaian oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada komoditas tanaman pangan capaian realisasi terhadap produksi tanaman pangan sebesar 16,63% , untuk produksi tanaman hortikultura sebesar 5,52%, dan produksi tanaman perkebunan sebesar 1,26%.

Tabel 3.29
Jumlah Produksi sektor pertanian tahun 2022

Komoditas	Jumlah Produksi
1. Tanaman Pangan, berupa : - Padi - Porang - Jagung - Kacang Tanah - Kedelai - Kacang Hijau	328.953.34 Ton
2. Tanaman Hortikultura, berupa : - Bawang Merah - Mangga - Cabe - Durian	3.113.55 Ton
3. Tanaman Perkebunan, berupa : - Kelapa Dalam - Lada - Kakao - Kopi - Cengkeh - Nilam - Pala	69.627.61 Ton

Untuk meningkatkan produksi pertanian tersebut dengan pemberian bantuan diserahkan kepada masyarakat (kelompok tani) yaitu :

- 540 Kg Benih Dasar Pokok Tanaman Pangan
- 25.008 Kg Benih Sebar Tanaman Pangan
- 20.000 Kg Bibit Sebar Tanaman Pangan
- 9 Jenis Sarana Pendukung yang diberikan ke Penangkar Tanaman Pangan
- 21 Unit Alat Pasca Panen Tanaman Pangan
- 6 Unit Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- 300 Kg Benih Dasar Tanaman Hortikultura
- 2.300.90 Kg Benih Sebar Tanaman Hortikultura
- 3.900 Phn Bibit Sebar Tanaman Hortikultura
- 3 Jenis Sarana Pendukung yang diberikan ke Penangkar Tanaman Hortikultura
- 329 Unit Alat Pasca Panen Tanaman Hortikultura
- 1 Unit Alat Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
- 43.260 Phn Bibit Sebar Tanaman Perkebunan
- 500 Phn Bibit Dasar Tanaman Perkebunan
- 3 Jenis Sarana Pendukung yang diberikan ke Penangkar Tanaman Perkebunan
- 6 Unit Alat Pasca Panen Tanaman Perkebunan
- 5 Unit Alat Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
- 34.090 Kg pupuk
- 184 unit alat dan mesin pertanian prapanen

Bantuan lainnya diserahkan kepada masyarakat dalam mencapai peningkatan produksi pertanian, yaitu :

a. Bantuan bibit pertanian dan subsidi pupuk, yaitu :

- Combine Harvester 15 Unit
Rp. 7.602.000.000; 15 Kelompok
- Power Thresher Multiguna 2 Unit
Rp. 87.500.000 Kelompok
- Penggilingan Padi Portable 4 Unit
Rp. 45.000.000; 1 Kelompok
- Mesin Pengupas Kulit Kedelai 2 Unit
Rp. 6.900.000; 2 Kelompok
- Continous Band Sealer Horizontal 2 Unit
Rp. 11.500.000; 2 Kelompok
- Mesin Peniris Minyak Otomatis 2 Unit
Rp. 34.500.000; 2 Kelompok
- Mesin Pembuat Susu Kedelai
2 Unit Rp. 6.900.000; 2 Kelompok
- Likat Kuning Benih Cabe (Pengembangan
Kampung Sayur) 880 lembar Rp.
17.600.000; 8 Kelompok
- Likat Kuning Benih Tomat
(Pengembangan Kampung Sayur) 360
Lembar Rp. 7.200.000; 2 Kelompok 12.
- Bahan Pengendali OPT/Petragenol Cabe
(Pengembangan Kampung Sayur) 220
Botol Rp. 6.600.000; 8 Kelompok
- Bahan Pengendali OPT/Petragenol Tomat
(Pengembangan Kampung Sayur) 90
Lembar Rp. 2.700.000; 2 Kelompok
- Keranjang Sayur (PENGENDALIAN
INFLASI) 273 Buah Rp. 46.410.000; 4
Kelompok
- Alat Angkut Tiga Roda 5 Unit
Rp. 175.000.000; 5 Kelompok
- Alat Penyulingan Nilam 3 Unit
Rp. 450.000.000; 3 Kelompok
- Alat Pengolahan Kelapa 1 Unit
Rp. 22.236.000; 1 Kelompok
- Handsprayer/Power Sprayer 46 Unit Rp.
92.000.000; 2 Kelompok
- PowerSprayer 103 Unit Rp. 206.000.000;
6 Kelompok
- Handsprayer 40 Unit Rp.
50.000.000; 3 Kelompok
- Mesin Pemotong Rumput 127 Unit Rp.
317.182.500; 11 Kelompok



TOTAL BANTUAN

ALAT-ALAT PERTANIAN

SEBANYAK 651 UNIT UNTUK

198 KELOMPOK

- 1.414.221.237; 4 Kelomppk
- Alkon / Mesin Pompa Air 5 Unit Rp.
180.000.000; 5 Kelompok
- Cultivator 27 Unit Rp. 485.070.000;
27 Kelompok
- Handsprayer Cabe 22 Unit Rp.
16.500.000; 8 Kelompok
- Handsprayer Terung 9 Unit
Rp. 6.750.000; 7 Kelompok
- Handsprayer Tomat 9 Unit
Rp. 6.750.000; 2 Kelompok
- Saprodi 2.696 Botol
Rp. 200.000.000; 1 Kecamatan
- Persediaan Saprodi Obat-Obatan
Pertanian 1 Unit Rp. 70.000.000
- Handsprayer (PENGENDALIAN
INFLASI) 86 Unit Rp. 64.500.000; 4
Kelompok
- Handtractor (PENGENDALIAN
INFLASI) 5 Unit Rp. 175.000.000; 4
Kelompok
- Tanam Jagung Manual 7 Unit. Rp.
35.000.000; 2 Kelompok
- Mist Blower 62 Unit
Rp. 217.000.000; 4 Kelompok

Sarana dan prasarana serta infrastruktur di sektor pertanian yang mendukung peningkatan produksi pertanian, antar lain :

1. Pembangunan, pemeliharaan serta rehabilitasi 6 unit jaringan irigasi (air tanah dangkal)
2. Pembangunan, pemeliharaan serta rehabilitasi 3,55 km Panjang irigrasi tersier
3. Pembangunan 1 unit jaringan irigasi perpipaan
4. Pembangunan 1 unit embung
5. Pembangunan dan rehabilitasi 47,10 km panjang jalan pertanian
6. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi 2 unit DAM Parit
7. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi 1 unit Long Storage
8. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi 3 unit pintu air
9. Pembangunan/rehabilitasi 2 km saluran buang
10. Pembangunan/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung 3 BPP Kecamatan

Selain sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung peningkatan sektor pertanian yaitu dengan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi :

1. Pembinaan bagi penyuluh pertanian pada 23 BPP di Kecamatan
2. Pembinaan/penyuluhan bagi 200 kelompok tani yang dinilai kelas kemampuannya
3. Pemberdayaan pedesaan dan pembangunan pertanian pada 138 kelompok tani komoditi pedesaan
4. Pemberdayaan bagi 48 P3A/GP3A

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam peningkatan produksi pertanian, adalah :

1. Produksi jenis bawang merah tidak maksimal disebabkan luas tanam yang rendah hanya 1.500 KG di bagi ke 3 (tiga) kelompok tani dan harga bibit bawang merah terlalu mahal bagi petani sehingga mempengaruhi luas tanam.
2. Faktor iklim (curah hujan yang tinggi) menyebabkan serangan hama dan penyakit.

Sampai saat ini, perkembangan Kabupaten Banggai sangat bertumpu pada kemampuan mengelola dan mengembangkan sumber daya alam yang dimilikinya, dilihat dari aspek pemanfaatannya bagi pembangunan daerah/wilayah maupun dilihat dari aspek pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di daratan

maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan. Jenis-jenis ikan yang sebagian besar diusahakan perikanan tangkap di Kabupaten Banggai adalah ikan cakalang, tongkol, tuna dan udang. Untuk perikanan budidaya dibagi menjadi jaringan apung laut, jaring apung tawar, jaring tangkap tawar, keramba, kolam air deras, kolam air tenang, mina padi sawah, rumput laut, tambak intensif, tambak sederhana dan tambak semi intensi.

Sektor perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Banggai. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sehingga kontribusi sektor perikanan mengalami peningkatan, dengan senantiasa memberikan dukungan dalam mengoptimalkan potensi sektor perikanan melalui berbagai program dan inovasi dengan tetap mengindahkan aspek berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu Wilayah kabupaten Banggai memiliki perairan yang sangat luas, serta memiliki jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan yang cukup besar, sehingga Kabupaten Banggai bisa menghasilkan produk perikanan yang melimpah serta memiliki nilai jual di pasar internasional.

Kontribusi sektor perikanan dapat diperoleh dari kontribusi jumlah rumah tangga perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan budidaya, budidaya perikanan tambak, pembenihan perikanan.

Tabel. 3.30
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap, 2021-2022

Jenis Perikanan Tangkap	Jumlah RT	
	2021	2022
Perikanan Laut	6254	6572
Perairan Umum	-	-
Jumlah	6254	6572

Sumber : BPS Kab.Banggai

Tabel. 3.31
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya, 2021-2022

Jenis Perikanan Budidaya	Jumlah RT (2022)
Budidaya Laut	1060
Tambak	538
Kolam	330
Keram-ba	24
Jaring Apung	203
Sawah	28
Jumlah	2356

Sumber : BPS Kab.Banggai

Tabel 3.32
Budidaya Perikanan Tambak di Kabupaten Banggai, 2022

Jenis Budidaya	Luas Area (Ha)	Pola Budidaya		
		Tradisional	Semi	Intensif
Bandeng, Udang	1.323	473	-	850
Udang Windu	620	20	-	600
Jumlah	1.943	493		1.450

Sumber : BPS Kab.Banggai

Tabel 3.33
Pembenihan Perikanan Di Kabupaten Banggai, 2022

Jenis Pembenuhan	Luas/Area (m ²)	Produksi/Siklus (ekor)
Nila, Mas, Koi, Udang, Lele	1.040	12 322 500
Lele Dumbo	10	1.000
Jumlah	1.050	12 323 500

Sumber : BPS Kab.Banggai

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sumber daya perikanan di Kabupaten Banggai, yaitu :

1. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional.
2. Keterbatasan petugas teknis/penyuluh perikanan lapangan baik dalam jumlah maupun kualifikasi.
3. Penggunaan Alat penangkapan ikan berupa pukat ikan, pukat udang sehingga dapat merusak karang dan sumber daya ikan

Untuk mencapai peningkatan produksi perikanan telah dilakukan pemberian bantuan diserahkan kepada masyarakat, yaitu :

a. Bantuan Alat Tangkap Nelayan

REALISASI 2022	421 unit	Rp. 4.458.592.000,-
1. Bantuan Alat Penangkapan Ikan	178 unit	Rp. 1,290,592,000,-
2. Bantuan Armada Penangkapan Ikan	19 unit	Rp. 1,350,000,000,-
3. Bantuan Mesin Pendukung Penangkapan Ikan	244 unit	Rp. 1,818,000,000,-



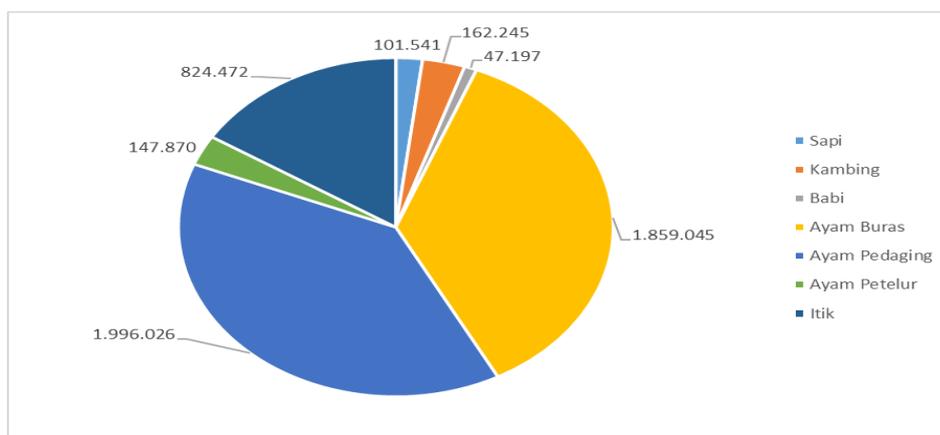
Sektor peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Banggai baik dalam

pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, bagian dari sistem ketahanan pangan maupun penyediaan bahan baku industri.

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Banggai diklasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu :

1. Ternak besar meliputi : sapi, kerbau dan kuda
2. Ternak kecil meliputi : kambing, domba dan babi
3. Ternak unggas meliputi : ayam kampung, ayam ras, dan itik

Grafik 3.23
Populasi ternak dan unggas menurut jenisnya (ekor), 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Produksi daging ternak di Kabupaten Banggai dapat terlihat pada tabel 3.34 bahwa produksi ternak pada tahun 2022 hanya terdapat pada jenis ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik berbanding dengan produksi ternak pada tahun 2021 yaitu pada jenis ternak sapi potong, kambing, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik.

Tabel. 3.34
Produksi daging ternak menurut jenis ternak, 2021-2022

Jenis Ternak	Produksi Daging (Kg)	
	2021	2022
Sapi Potong	344.86	-
Kambing	397.22	-
Babi	14 179	-
Ayam Buras	3 152 734	3 209 956
Ayam Pedaging	25 506	40 498
Ayam Petelur	1 758 039	1 762 618
Itik	510 876	567 231

Sumber : Badan Pusat Statistik

Produksi telur unggas di Kabupaten Banggai dapat terlihat pada tabel 3.35 bahwa produksi telur unggas pada tahun 2022 hanya terdapat pada jenis ternak ayam buras, ayam petelur dan itik berbanding dengan produksi ternak pada tahun 2021 yaitu pada jenis ternak ayam buras, ayam petelur, dan itik.

Tabel. 3.35
Produksi telur unggas di Kabupaten Banggai, 2021-2022

Jenis Ternak	Produksi Telur Unggas (butir)	
	2021	2022
Ayam Buras	89 229 207	1 205 332
Ayam Petelur	110 741 583	408 887
Itik	334 277 484	5 802 579
Itik	65.226	-

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam upaya mencapai peningkatan produksi peternakan, dihadapi berbagai hambatan antara lain :

1. Keberadaan usaha atau unit pembibitan ternak di kabupaten banggai perlu ditingkatkan perannya.
2. Sarana dan Prasarana rumah potong hewan (RPH) dan poskeswan yang belum memadai

Adapun Langkah-langkah untuk mencapai peningkatan produksi peternakan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan diserahkan kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Bantuan bibit ternak



REALISASI 2022		45 Kelompok	Rp. 3.411.375.000,00
1. Ternak Ayam Kampung Super	1.600 Ekor	3 kelompok	Rp. 160.000.000,00;
2. Ternak DOC KUB	1.000 Ekor	1 kelompok	Rp. 15.000.000,00;
3. Ternak Ayam Kampung	600 Ekor	2 kelompok	Rp. 66.000.000,00;
4. Ternak Ayam Petelur	2.750 Ekor	6 Kelompok	Rp. 281.875.000;
5. Ternak Sapi Bali	290 Ekor	29 Kelompok	Rp. 2.624.500.000,00;
6. Ternak Kambing PE	36 Ekor	3 kelompok	Rp. 186.000.000,00;
7. Ternak Kambing Kacang	24 Ekor	1 Kelompok	Rp. 78.000.000,00;



2. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada wilayah-wilayah yang menjadi sentra hasil peternakan

Sektor pertambangan merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Banggai, dilihat dari aspek pemanfaatannya bagi pembangunan daerah/wilayah maupun dilihat dari aspek pembangunan yang berkelanjutan yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Banggai.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Banggai diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi. Adapun potensi pertambangan di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel 3.36

Tabel 3.36
Potensi Pertambangan Mineral, Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Banggai

No	Jenis Tambang	Potensi	Lokasi	Keterangan	No	Jenis Tambang	Potensi	Lokasi	Keterangan
1.	Minyak dan Gas Bumi								
	- Blok Senoro	- Cadangan terbukti: 1.583 TCF (Triliun Kaki Kubik) - Cadangan Kemungkinan: 1.051 TCF - Cadangan Harapan: 1.088 TCF	Kec. Batu dan Kec. Batu Selatan	Luas ± 6.100 Ha. Pengelola: Job Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi, dengan Skema Hilir			- Rencana Pengembangan pertambangan rakyat	dan Sumpang Raya	
	- Blok Matindok	- Total cadangan 0,7 TCF (GCA certification of EUR) - Kapasitas Liquid 800 bpd - Kapasitas Gas 65 mmscfd Onstream Q1 2017	Kec. Toili, Mollong, Toili Barat (Maleo Raja, Sukamaju, Donggi, Mantawa, Minahadi)	Pengelola : PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP)					
2.	Mineral Logam								
	- Nikel	Terdapat pada letak dan saprotit hasil pelapukan ±10.500 Ha. ±174.271.927 Ton kadar nikel rata-rata 1,5-2%(low grade)	Kec. Toili Barat, Toili, Batu selatan, Luwuk Timur, Macama, Fagimana, Balantak selatan, Bualamo, Bunta, Nuhon						
	- Emas	- Emas sekunder terdapat pada endapan aluvial	Toili, Toili Barat, Mollong	Belum ditemukan emas primer					
3.	Mineral Non Logam								
	- Komoditi Batu Gamping	Sumber Daya Hipotetik ±6.459.185.100 Metrik Ton						Balantak, Lamala, Mantoh, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nuhon Kintom, Fagimana	
	- Komoditi Ultra Basa	Sumber Daya Hipotetik ±7.002.504.500 Metrik Ton						Balantak, Nuhon, Bualamo, Fagimana, Luwuk Timur, Toili Barat	
	- Komoditi Bentonit	Sumber Daya Hipotetik ±43.796.400 Metrik Ton						Desa Pangkalaseang	
	- Komoditi Sirtu	Sumber Daya Hipotetik ±35.800.000 Metrik Ton						Kintom, Fagimana	
	- Komoditi Lempung	Sumber Daya Hipotetik ±983.014.000 Metrik Ton						Luwuk Utara, Fagimana	
	- Komoditi Dolomit	Sumber Daya Hipotetik ±255.818.000 Metrik Ton						Luwuk Utara, Nuhon	

Sumber : RPJMD Kab.Banggai 2021-2026

Adapun faktor keberhasilan atau peningkatan pencapaian kinerja indikator kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB antara lain adanya program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu program Kabupaten, Provinsi maupun Pusat/Kementerian, yang mana Pemerintah Kabupaten Banggai melaksanakan suatu program yaitu “ **Satu Juta Satu Pekarangan**” yang di kelola oleh beberapa dinas terkait antara lain : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dll.

2. Indeks Ketahanan Pangan

Dari tabel 3.24 Target RPJMD dari Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai pada tahun 2022 sebesar 86,64 dan terealisasi sebesar 85,73, dengan capaian kinerja sebesar 98,95%. Dari realisasi bahwa indikator Indeks Ketahanan Pangan belum mencapai target RPJMD di tahun 2022. Berdasarkan hasil IKP yang dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bahwa peringkat IKP Kabupaten Banggai berada pada urutan skor terbaik ke-27 dari 416 Kabupaten Se-Indonesia.

Grafik 3.24
Perbandingan IKP Kab.Banggai, Provinsi dan Nasional, 2022



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Dari grafik 3.19 nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2022 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi berada pada peringkat pertama Se-Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Nasional Kabupaten Banggai memperoleh nilai indeks melebihi nilai indeks Nasional.

Indeks ketahanan pangan berdasarkan atas tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan pangan didasarkan indikator Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan di

tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras sedang Kabupaten Banggai target cadangan pangan sebanyak 20 ton, yang berarti cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Banggai masih jauh dari target nasional yaitu 100 ton.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang melalui :

1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik)
2. Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumber daya lokal
3. Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Tabel 3.37
Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai, 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Kab. Banggai	Skor PPH Maksimal
1.	Padi-Padian	25,0	25,0
2.	Umbi-Umbian	1,5	2,5
3.	Pangan Hewani	21,8	24,0
4.	Minyak dan Lemak	0,0	5,0
5.	Buah/Biji berminyak	1,0	1,0
6.	Kacang-Kacangan	8,3	10,0
7.	Gula	0,1	2,5
8.	Sayuran dan Buah	4,4	30,0
Jumlah		62,15	100,0

Sumber : Neraca Bahan Makanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2022

Tabel 3.38
Angka Kecukupan Energi dan Protein
Kabupaten Banggai, 2022

No.	Ketersediaan	Tahun 2021	Nasional
1.	Energi (kkal/kapita/hari)	7.320	2.400
2.	Protein (gram/kapita/hari)	194.35	63

Tabel 3.39
Cadangan Pangan Kabupaten Banggai,
2022

No.	Uraian	Kabupaten Banggai tahun 2022	Permentan No.65 tahun 2010
1.	Cadangan Pangan Kabupaten	20 ton	100 ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2022

b. Aspek Keterjangkauan Pangan

Aspek keterjangkauan/akses pangan didasarkan indikator persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik, sebagai berikut :

Grafik 3.25
Jumlah & Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Banggai, 2012—2022



Grafik 3.26
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Banggai, 2012—2022

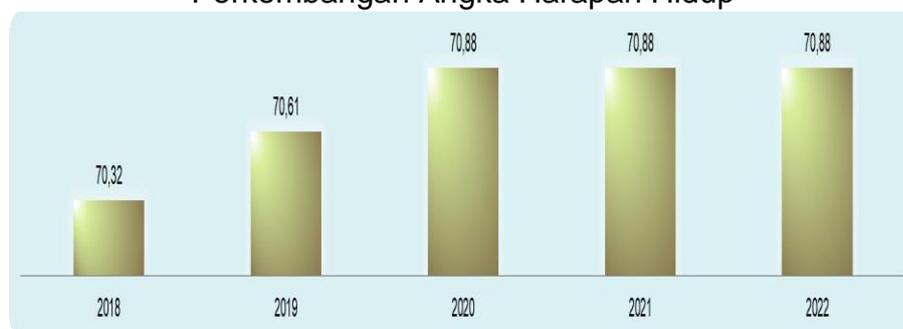


Sumber : BPS Kabupaten Banggai

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek pemanfaatan pangan didasarkan indikator rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita stunting, dan angka harapan hidup pada saat lahir.

Grafik 3.27
Perkembangan Angka Harapan Hidup



Sumber : BPS Kabupaten Banggai

Adapun program yang mendukung sasaran “Meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat” adalah :

Tabel 3.40
Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah

No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	34.270.267.490,15	32.543.960.807,00	94,96
2	Penyediaan Dan Pengembangan prasarana Pertanian	20.774.057.671,00	20.466.997.457,00	98,52
3	Perizinan Usaha Pertanian	134.891.950,00	131.884.532,00	97,77
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	526.028.000,00	495.669.980,00	94,23
5	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.945.014.110,00	1.712.987.864,00	88,07
6	Pengelolaan perikanan tangkap	6.100.470.650,00	5.990.460.971,00	98,20
7	Pengelolaan perikanan budidaya	2.452.778.603,00	2.358.856.407,00	96,17
8	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	512.872.400,00	508.588.889,00	99,16
9	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	5.186.319.510,00	5.091.368.077,00	98,17
10	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	766.955.080,00	763.296.680,00	99,52
11	Penanganan kerawanan pangan	1.063.899.150,00	988.851.370,00	92,95
12	Pengawasan keamanan pangan	144.853.092,00	140.625.136,00	97,08
13	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	196.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	73.876.603.706,15	71.193.548.170,00	96,37

Sumber : BPKAD Kab.Banggai 2022

Tingkat efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah dengan 2 (dua) indikator, yaitu : indikator Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB dan indikator Indeks ketahanan pangan memperoleh capaian sebesar 98,28%, sehingga

rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran tersebut adalah sebesar 109,52% kategori “baik sekali”. Adapun pagu anggaran untuk sasaran Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah sebesar Rp. 73.876.603.706,15 dengan realisasi Rp. 71.193.548.170,00 diperoleh serapan sebesar 96,37%, sehingga dapat terlihat bahwa perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran terdapat efisiensi sebesar 13,15% dan efektivitas sebesar 113,65%.

Tabel. 3.41
 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak
 Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,6	78,70	114,72	80,418	79,20	98,48	83,618	94,72
Rata-rata capaian kinerja					114,72			98,48		94,72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Banggai (data diolah)

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. Dari tabel 3.31 di atas terlihat bahwa realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 yaitu sebesar 79,20 dengan target RPJMD pada tahun 2022 yaitu sebesar 80,418, sehingga diketahui bahwa realisasi indeks kualitas lingkungan hidup belum mencapai target RPJMD pada tahun 2022. Nilai IKLH Kabupaten Banggai masih masuk dalam kategori “**Baik**”. Untuk tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022 yaitu sebesar 98,48%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 78,70 mengalami kenaikan sebesar 0,5 point ditahun 2022 yaitu sebesar 79,20. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 79,20 dengan target akhir RPJMD (2026) sebesar 83,618 diperoleh capaian sebesar 94,72.

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggunakan formulasi $IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)$. Pada tahun 2022, Kabupaten Banggai mendapatkan nilai IKLH sebesar 79,20. Pada table 3.32

dibawah ini menunjukkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Vegetasi Hutan/Lahan Serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai :

Tabel 3.42
Indeks Kualitas Air

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA
		Meme nuhi	Ring an	Sed ang	Berat	Meme nuhi	Ring an	Sed ang	Berat	
1	Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	22	2	0	0	64,17	4,17	0,00	0.00	68,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Tabel 3.43
Indeks Kualitas Udara

No	Kabupate/ Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	8,43	8,74	0,21	0,44	0,32	87,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Tabel 3.44
Indeks Kualitas Lahan/Vegetasi Hutan

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	0,65	82,40	0,00	0,65181650807641	82,40

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

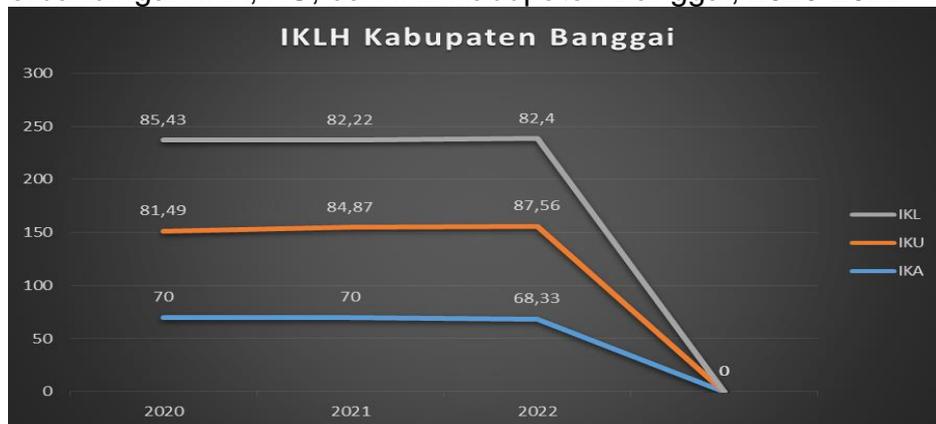
Tabel 3.45
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banggai, 2022

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target	Rating
1	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	68,33	87,56	82,40	79,20	76,67	BAIK

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Banggai mendapatkan nilai IKLH sebesar 79,20 pada kategori (BAIK) dengan rincian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 68,33, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,56, dan Indeks Kualitas Vegetasi Hutan/Lahan (IKL) sebesar 82,40.

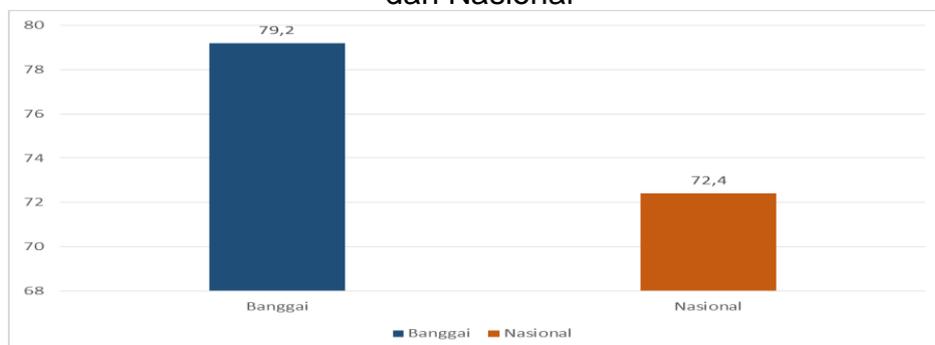
Grafik 3.28
Perbandingan IKA,IKU, dan IKL Kabupaten Banggai, 2020-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Dari grafik 3.22 terlihat bahwa kenaikan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Banggai tahun 2022 di bandingkan tahun 2021 di picu oleh kenaikan nilai IKU dan IKL namun mengalami penurunan pada IKA. Penurunan pada IKA disebabkan karena dinamika lingkungan dengan meningkatnya jumlah penduduk, perilaku penduduk. Untuk menghindari menurunnya angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dibutuhkan peran serta semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan.

Grafik 3.29
Perbandingan IKLH Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IKLH kabupaten Banggai tahun 2022 sebesar 79,20 meningkat sebesar 6,8 point dibandingkan realisasi IKLH Indonesia tahun 2022.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Adanya peningkatan lalu lintas kendaraan.
- b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam meningkatkan pengelolaan sampah masih rendah.
- c. Sarana dan prasarana dalam menunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum memadai.

Upaya untuk meningkatkan tercapainya IKLH, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengurangi emisi gas buang pengguna kendaraan bermotor
- b. Pemantauan dan pengawasan terhadap industry dan usaha/kegiatan yang menghasilkan emisi udara
- c. Penanaman pohon secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi dampak polusi.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bank sampah dan pelanggannya.
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan IPAL di perusahaan-perusahaan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
- f. Melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dan berkala
- g. Penetapan wilayah hutan kota agar tidak mudah dialihfungsikan untuk penggunaan yang lain.
- h. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau.
- i. Peningkatan edukasi ke berbagai pihak akan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan.

Adapun program yang mendukung sasaran “Meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat” adalah :

Tabel 3.46

Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat

No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	449.258.000,00	435.676.100,00	96,98
	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.194.604.325,00	830.091.995,00	69,49
2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.770.592.618,00	2.959.816.154,00	62,04
3	Pengendalian Bahan	616.247.986,00	596.070.100,00	96,73

	Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			
4	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	88.957.550,00	87.563.550,00	98,43
5	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	178.352.800,00	126.653.371,00	71,01
6	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	19.172.300,00	14.096.300,00	73,52
7	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	67.845.080,00	47.549.240,00	70,09
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.482.800,00	19.385.800,00	99,50
9	Pengelolaan Persampahan	12.898.032.649,00	12.898.032.649,00	96,93
	Jumlah	20.302.546.108,00	18.014.935.259,00	88,73

Sumber : BPKAD Kab.Banggai

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 98,48% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 18.014.935.259,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 20.302.546.108,00 atau sebesar 88,73%.

Tabel. 3.47
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	-	-	-	2,37	0,30	12,66	3,10	9,68
Rata-rata capaian kinerja							12,66		9,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai

Dari tabel 3.37 Target RPJMD dari Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2022 sebesar 2,37% dan terealisasi

sebesar 0,30%, dengan capaian kinerja sebesar 12,66% sehingga dapat dikatakan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB menurun atau tidak mencapai target RPJMD tahun 2022 sebesar 2,37. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 9,68%

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata juga salah satu sektor yang paling pesat pertumbuhannya. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Banggai memiliki destinasi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, dengan mulai memprioritaskan upaya pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas daerah. Upaya ini dilakukan secara terpadu dan terintegrasi lintas perangkat daerah, yang di fokuskan pada upaya 1) pengembangan destinasi wisata, 2) pengembangan industri pariwisata, 3) pengembangan pemasaran pariwisata, dan 4) pengembangan kelembagaan pariwisata.

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dapat dilihat dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang didukung dengan adanya kunjungan wisatawan, jumlah restoran. Penyediaan Akomodasi merupakan Penyediaan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha Penyediaan Akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari Hotel Berbintang dan Non Bintang.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Banggai pada tahun 2022, yaitu :

Tabel 3.48
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Kabupaten Banggai Tahun 2022

Bulan	WISNUS	WISMAN	JUMLAH
Januari	10.001	7	10.008
Februari	1.836	20	1.856
Maret	1.986	3	1.989
April	245	13	258
Mei	234	3	237

Juni	201	0	201
Juli	2.058	4	2.062
Agustus	1.292	28	1.320
September	3.349	5	3.354
Oktober	2.023	4	2.027
November	2.864	4	2.868
Desember	1.439	12	1.451
Jumlah 2022	27.528	103	27.631
Jumlah 2021	27.833	22	27.855
Jumlah 2020	48.426	4.898	53.324

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Dalam Angka 2023 (Data Diolah)

Pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel berbintang dan non bintang di Kabupaten Banggai pada tahun 2022, yaitu :

Tabel 3.49

Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang tersedia pada Hotel Berbintang dan Non Bintang, Penginapan, Home Stay, Losmen, Cottage, Guest House, Wisma di Kabupaten Banggai Tahun 2022

No	Akomodasi	2022	
		Kamar	Tenaga Kerja
1	Hotel Santika	77	65
2	Hotel Aston/Estrella	92	102
3	Hotel Swiss Bel In	102	58
4	Hotel Dinasty	35	12
5	Hotel Imperial	22	5
6	Hotel Rosalina	24	9
7	Hotel Grand Soho	39	16
8	Green Hotel	29	516
9	Hotel Karathon	32	10
10	Hotel Ramayana	35	11
11	Hotel Igora	27	7
12	Hotel Permai	33	11
13	Hotel Melati	9	2
14	Hotel Citra	36	4
15	Hotel Gemilang	22	2
16	Hotel Kota	26	15
17	Hotel Erni	5	3
18	Hotel Sadar Stay	24	4
19	Hotel Ananda	8	3
20	Hotel Ebony	10	1
21	Wisma Selebes	18	4
22	Hotel Boulevard	24	8
23	Penginapan Orchid	19	2
24	Penginapan Taiyo	19	2
25	Losmen Ashari	12	1
26	Penginapan Senang Hati	13	7
27	Penginapan Baru	10	1
28	Wisma Azhari	20	1
29	Hotel Ceria	15	3
30	Penginapan Garuda	19	2

31	Losmen Pulau Bokan	12	1
32	Losmen Cahaya Wulan	5	1
33	Penginapan Srikandi	3	1
34	Penginapan Sabar	3	1
35	Penginapan Waraswati	6	3
36	Penginapan Ester	9	5
37	Cakrawala Hotel	21	3
38	Losmen Duta	5	3
39	Penginapan Pelangi	18	2
40	Grand City	9	1
41	Hotel Udhi Arta	14	2
42	Penginapan Andika Wahyu	15	1
43	Hotel Estrella	19	6
44	Penginapan Valentine	5	1
45	Penginapan D'Vila	10	2
46	Hotel King Amir	34	16
47	Resort Tompotika	5	12
48	Penginapan Moro Seneng	9	1
49	Penginapan Baruga	23	5
50	Penginapan B & B	9	1
51	Penginapan Salota	10	3
52	Penginapan D'Cost	8	1
53	Amy Home Stay	10	1
54	Dx Home Stay	10	2
55	Penginapan Aladin	10	1
56	Penginapan Anggrek	5	1
Jumlah		1.143	469

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Grafik 3.30
Perkembangan jumlah restoran, 2019-2022



inilah yang dimanfaatkan masyarakat Kabupaten banggai untuk membuka peluang usaha rumah makan atau restoran. Sehingga sejak tahun 2019 jumlah keseluruhan rumah makan/ restoran di Kabupaten Banggai berjumlah 95 unit. Di tahun 2020 mengalami perkembangan yang sangat signifikan mencapai 272 unit. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah 248 unit, hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Seiring berjalannya waktu dan Pandemi Covid-19 telah berangsur-angsur mulai mereda dan perekonomianpun mulai berjalan

Kabupaten Banggai terkenal dengan berbagai keindahan alamnya. Keindahan alam ini dijadikan Pemerintah Kabupaten Banggai menjadi potensi penarik wisatawan untuk berkunjung. Salah satu yang dicari wisatawan adalah kuliner daerah wisata. Kesempatan

kembali aktivitas masyarakatpun mulai berjalan sehingga pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah yaitu 446 unit. Pada tabel dibawah ini menunjukkan Jumlah rumah makan/restoran menurut kecamatan di Kabupaten Banggai pada tahun 2019-2022, yaitu :

Tabel 3.50
Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan
di Kabupaten Banggai Tahun 2019-2022

Kecamatan	2019	2020	2021	2022
Toili	1	2	3	22
Toili Barat	9	11	9	9
Moilong	1	0	0	24
Batui	3	3	4	9
Batui Selatan	-	0	2	11
Bunta	2	9	7	7
Nuhon	-	0	10	10
Simpang Raya	-	0	0	-
Kintom	-	0	0	-
Luwuk	56	119	90	126
Luwuk Timur	-	4	5	7
Luwuk Utara	-	16	10	26
Luwuk Selatan	10	64	75	163
Nambo	-	1	4	4
Pagimana	7	27	10	10
Bualemo	-	4	0	4
Lobu	-	0	2	2
Lamala	2	0	0	-
Masama	2	12	12	12
Mantoh	-	0	0	-
Balantak	2	0	3	-
Balantak Selatan	-	0	0	-
Balantak Utara	-	0	2	-
Jumlah	95	272	248	446

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Dalam Angka 2023 (Data Diolah)

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, yaitu :

1. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan yang aman dan nyaman bagi wisatawan serta sumber daya manusia pengelola pariwisata.
2. Mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi, informasi dan pemasaran pariwisata
3. Mengotimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.
4. Peningkatan kreativitas, krasi, atraksi dan inovasi destinasi pariwisata serta fasilitas pendukung destinasi pariwisata.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah”, yaitu:

Tabel 3.51
Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.516.110.814,00	1.462.498.851,00	96,46
2	Pemasaran Pariwisata	1.073.078.350,00	872.505.440,00	81,31
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	432.341.351,00	413.236.670,00	95,58
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	885.959.150,0	825.643.385,00	93,19
	Jumlah	3.907.489.665,00	3.573.884.346,00	91,46

Sumber : BPKAD Kab.Banggai

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 12,66% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.573.884.346,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.907.489.665,00 atau sebesar 91,46%.

Tabel. 3.52
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	-	48,11	23,04	47,89	56,31	40,92
Rata-rata capaian kinerja							47,89		40,92

Sumber : Disdikbud, Dispar, DP2KBP3A

Dari tabel 3.53 Target RPJMD dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada tahun 2022 sebesar 48,11 dan terealisasi sebesar 23,04, dengan capaian kinerja sebesar 47,89% sehingga dapat dikatakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tidak mencapai target RPJMD tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 40,92%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) diukur pada 7 (tujuh) dimensi yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

Proses penghitungan IPK ini didukung oleh data-data dari Lembaga terkait lainnya, sehingga memenuhi 7 dimensi IPK. Akan tetapi indikator penyusunan IPK di batasi pada dimensi yang menjadi wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dikarenakan ketersediaan data penyusunan IPK Kabupaten Banggai tahun 2022 memerlukan data terbaru, yaitu data 2022 yang bersumber dari BPS atau Lembaga lain. Namun ketersediaan data tersebut belum memadai, sehingga akan sulit untuk melakukan penghitungan.

Saat ini capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Banggai dihitung berdasar representasi dari prosentase capaian dari indikator yaitu : indikator ekonomi budaya, indikator pendidikan, indikator warisan budaya, dan indikator gender.

Dimensi pertama, ekonomi budaya menunjukkan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, dapat terepresentasi dari jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pertunjukan seni berjumlah 812 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Banggai 370.362 jiwa atau 0,22%.

Tabel 3.53
Komunitas Seni Pertunjukkan
Kabupaten Banggai Tahun 2022

NO	KECAMATAN	NAMA PEMILIK	NAMA DAN JENIS USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	KET
1	Luwuk	Susanti Maaku Olden Liong None, A.Md Yati Tapo	Sanggar Kulele	15	Aktif
			Sanggar Tari Maleo	50	Aktif
			Bengkel Teater Cahaya	50	Aktif

			ART Polabotan Untika	100	Aktif
			Animo Tampurung Unismuh Luwuk	100	Aktif
			Sanggar Perina	10	Tidak Aktif
2	Luwuk Selatan	Subrata Kalape, S.Sn	Komunitas Seni Rompong	300	Aktif
3	Nambo	Suparman Tampuyak, S.Pd	Studio Budaya Banggai	30	Aktif
4	Bunta	Rahman Sangkota	Sanggar Konau	20	Aktif
		Zulfianto Bunai	Sanggar Pasingkabota - Tari Maleo - Tari Mombau Gulamea	30	Aktif
5	Simpang Raya	Daniel Binayan	Cakalele	10	Aktif
		Ketua : Sujiono Wakil Ketua : Mujut Priyono Anggota : Tarkun, Poniran, Bejo, Warsum Syamsuri, Mugi Setyo, Jerjikon, Miseni, Muryadi, Haryono, Hjh. Untung, Sutan	Seni Reog Singo Manunggal	20	Aktif
6	Masama	Amalia Laise, S.Pd	Sanggar Seni Lintang	30	Aktif
7	Lamala	Wanrius Kalopet	Sanggar Palealu Musik Bambu	27	Aktif
8	Balantak	Risno Lamonjong	Sanggar Kobelasanmae	20	Aktif
	JUMLAH			812	

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.Banggai (Data Diolah)

Dimensi kedua, pendidikan dapat terepresentasi dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,54, Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,34 dan diperoleh nilai dimensi pendidikan 10,94%. Dimensi ketiga, warisan budaya terepresentase dari persentase warisan budaya baik benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya maupun warisan tak benda yang telah ditetapkan yaitu 19 warisan budaya benda cagar budaya benda dan tak benda terhadap 37 warisan budaya yang ada yaitu sebesar 51,35%. Untuk warisan budaya tak benda Kabupaten Banggai memiliki 1 (satu) warisan budaya tak benda, yaitu Mombowa Tumpe berupa ritual adat istiadat yang berasal dari suku saluan di Kecamatan batu.

Tabel 3.54
Aset Cagar Budaya Kabupaten Banggai

No	Tahun Periode Kegiatan	Nama Aset Cagar Budaya	Klasifikasi Cagar Budaya	Lokasi Cagar Budaya	Tahun Penetapan	Status Kepemilikan
1	1940	Jembatan Lobu	Struktur	Kec. Lobu	2018	Kelompok / Masyarakat
2	1920	Kantor Dprgr	Bangunan	Kec. Lobu	2018	Pemerintah
3	1935	Rumah Kapitan (Museum Daerah)	Bangunan	Kec. Luwuk	2018	Pemerintah
4	1936	Rumah Sakit Umum Luwuk/Akper	Bangunan	Kec. Luwuk	2018	Pemerintah
5	1450	Makam Abdullah Bin Abd. Kadir Djaelani Alkusaini/ Pekuburan Je're	Struktur	Kec. Luwuk	2018	Ahli Waris /Keturunan
6	1890	Rumah Bapak Zuhri Noho	Bangunan	Kec.Kintom	2018	Perorangan
7	1918	Gereja Tua Simpangan	Bangunan	Kec.Kintom	2018	Masyarakat
8	1920	Rumah Adat Desa Lambangan	Bangunan	Kec.Masama	2018	Perorangan
9	1920	Masjid Nurul Huda Desa Lambangan	Bangunan	Kec. Pagimana	2018	Masyarakat
10	Zaman Animisme	Kuburan Perahu (Kubuangan Duangan)	Situs	Kec. Lobu	2020	Masyarakat
11	1940	Sumur Tua Lobu	Struktur	Kec. Lobu	2020	Ahli Waris/ Keturunan
12	Awal Abad Ke 20	Masjid Tua Annur Lobu	Bangunan	Kec. Lobu	2020	Masyarakat
13	Abad Ke 16 M	Benteng Konambota	Struktur	Kec. Nambo	2020	Masyarakat
14	Abad Ke 16 -19 M	Makam Ambaral	Struktur	Kec. Masama	2020	Masyarakat
15	Abad Ke 16 -19 M	Makam Rajawali	Struktur	Kec. Masama	2020	Masyarakat
16	1942	Bunker Jepang	Struktur	Kec. Balantak Utara	2020	Pemerintah
17	Abad Ke 16 -19 M	Benteng Raja Mbulang	Struktur	Kec. Balantak	2020	Pemerintah
18	Awal Abad Ke 20	Komplek Kodim Luwuk	Situs	Kec. Luwuk	2020	Pemerintah

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022 (Data Diolah)

Dimensi keempat, Gender dapat terepresentasi dari rasio anggota parlemen perempuan 8 orang terhadap anggota parlemen laki-laki 27 orang atau 29,63% diperoleh nilai dimensi Gender 29,63%

Tabel 3.55
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2022

No	Nama Dimensi	Nilai
1	Ekonomi Budaya	0,22
2	Pendidikan	10,94
3	Warisan Budaya	51,35
4	Gender	29,63
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		23,04

Adapun faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan daerah melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan babasalan serta moderasi beragama dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan cagar budaya di seluruh Kabupaten Banggai
2. Keberadaan gedung budaya dimaksimalkan pemanfaatannya dengan menyelenggarakan berbagai even budaya, terutama untuk meningkatkan daya Tarik wisata di Kabupaten Banggai
3. Melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok kesenian secara kontinyu dan mendorong untuk menyelenggarakan event secara mandiri.
4. Keterlibatan masyarakat untuk melestarikan budaya yang tinggi
5. Adanya pertunjukan seni sebagai ajang untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.

Dalam proses upaya pencapaian pembangunan kebudayaan, terdapat hambatan/kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas.
2. Pemanfaatan objek-objek budaya masih minim.
3. Kurangnya fasilitasi atau pembinaan bagi kelompok seni guna menguatkan pengetahuan mereka terkait seni dan tradisi.

Terkait permasalahan tersebut maka solusi yang dilakukan yaitu :

1. Melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan budaya. Kolaborasi seni tradisi dengan seni modern untuk menarik minat generasi muda.
2. Melakukan pemetaan dan pendataan potensi objek budaya dengan menjalin komunikasi dengan pihak kecamatan dan desa guna membantu inventarisasi warisan baik benda ataupun takbenda.
3. Melakukan pembinaan bagi kelompok-kelompok seni budaya.

4. Perlunya upaya peningkatan sektor ekonomi kreatif bidang kebudayaan, dengan menjalin Kerjasama sektor pariwisata dalam hal promosi dan penataan wilayah.
5. Perlunya dukungan infrastruktur digital, berupa sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi guna mempromosikan budaya yang ada.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama”, yaitu:

Tabel 3.56
Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama

No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Pengembangan Kebudayaan	1.044.475.800,00	963.313.840,00	92,23
3	Pembinaan Sejarah	54.873.500,00	52.873.500,00	96,36
4	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	533.463.100,00	522.805.400,00	98,00
5	Pengelolaan Permuseuman	742.181.200,00	722.709.440,00	97,38
Jumlah		2.374.993.600,00	2.261.702.180,00	95,23

Sumber : BPKAD Kab. Banggai

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan daerah melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan babasalan serta moderasi beragama, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 11,73% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.261.702.180,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.374.993.600,00 atau sebesar 95,23%.

Tabel. 3.57
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	B	50	B	B*	100	A	50
2	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	-	-	-	Sangat Inovatif	Inovatif**	50	Sangat Inovatif/ Terinovatif	50

3	Nilai SAKIP	Predikat	-	A	A	A	A***	100	AA	100
Rata-rata capaian kinerja								83,33		66,67

Sumber : * dan *** Hasil Evaluasi KemenPANRB 2022
 ** Hasil Penilaian Kemendagri 2022

1. Indeks Reformasi Birokrasi

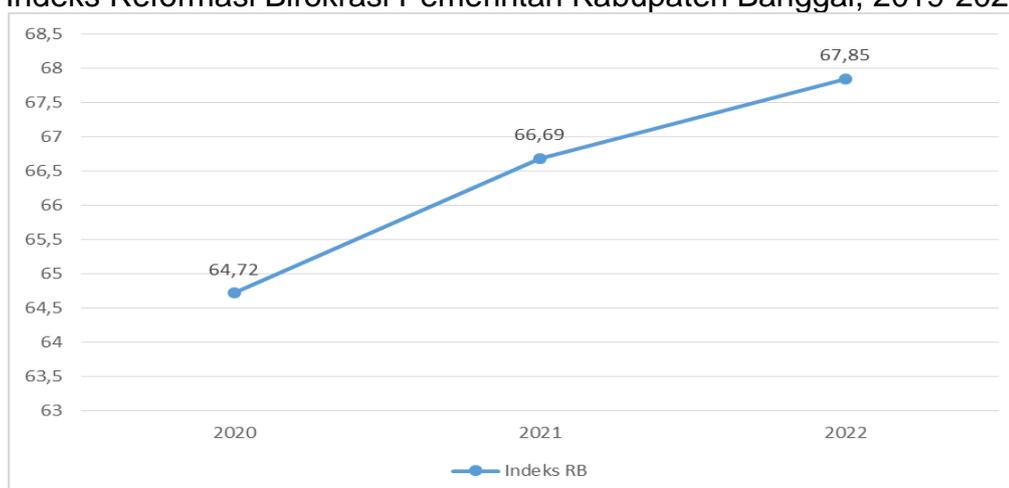
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banggai. evaluasi menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Sasaran Reformasi Birokrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan indikator keberhasilan, yaitu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan opini BPK (WTP).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikator keberhasilan yaitu integritas pelayanan publik dan peringkat kemudahan berusaha.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator keberhasilan yaitu Efektivitas Pemerintahan dan Instansi Pemerintah Yang Akuntabel.

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banggai yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian realisasi untuk tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD memperoleh nilai 67,85 dengan predikat “**B**”, sedangkan untuk tahun 2021 hasil evaluasi memperoleh nilai 66,69 dengan kategori “**B**”.

Grafik 3.31
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai, 2019-2022



Berdasarkan grafik 3.31 Terlihat bahwa adanya kenaikan nilai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2022 sebagaimana pada tabel 3.51 Berikut :

Tabel. 3.58
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai
Tahun 2021-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
I.	Pemenuhan	20,00	11,89	11,87
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,48	5,27
III.	Reform	30,00	18,50	18,18
	Total Komponen Pengungkit	60,00	35,87	35,32
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,72	8,60
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,20	9,08
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,79	8,35
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,11	6,50
	Total Komponen Hasil	40,00	30,82	32,53
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	66,69	67,85

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KEMENPAN RB Tahun 2022

Jika dibandingkan tahun 2021 terdapat peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yaitu sebesar 1,16 point di tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai telah berupaya untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen hasil.

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Banggai, sebanyak 9 (sembilan) hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *laading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.59
Hasil Antara Area Perubahan
Pemerintah Kabupaten Banggai, 2021-2022

No	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	121,50	KASN
2.	ASN Profesional	0-100	38,43	27,19	BKN
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	-	2,07	KemenPANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Barang dan jasa	0-100	72,39	70,30	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,89	3,89	KemenPANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	73,98	86,11	ORI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	-	7,48	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kualitas hasil antara pada kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Meskipun demikian penilaian ASN professional dan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Selain itu, terdapat 3 (tiga) indeks yang baru dilakukan pengukuran pada tahun 2022 yaitu indeks sistem merit, SPBE, dan kualitas pengelolaan arsip. Untuk indeks kualitas pelayanan publik masih berada di angka yang sama dengan tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Banggai telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut terhadap sebagian kecil rekomendasi yang telah KemenPANRB sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya:

- a. Menetapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang pengawasan, mulai dari gratifikasi, pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di setiap PD, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blower*

system (WBS) dan penanganan benturan kepentingan sebagai upaya memperkuat komponen pengawasan;

- b. Telah meningkatkan kualitas pelayanan publik, hal ini ditandai dengan adanya kenaikan signifikan pada indeks persepsi kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Banggai telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya :

- a. Road Map RB Kabupaten Banggai di tingkat Pusat/Pemda belum diformalkan, sehingga peta jalan RB belum terarah dan berangkat dari isu strategis yang ada di Kabupaten Banggai;
- b. Kualitas pembangunan reformasi birokrasi pada sebagian besar Perangkat Daerah belum sepenuhnya berfokus pada permasalahan yang dihadapi organisasi itu sendiri. Hal ini terlihat dari penyusunan rencana aksi yang belum berangkat dari isu strategis yang ada di PD, sehingga dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi belum dapat dirasakan baik dalam peningkatan kinerja organisasi maupun pelayanan publik yang prima;
- c. Agen perubahan (AoC) belum mempunyai rencana/target perubahan yang terukur yang memberikan dampak perubahan bagi organisasi;
- d. Belum tersedia peta keterkaitan kebijakan dan belum dilakukan identifikasi terhadap seluruh kebijakan yang masih berlaku di Kabupaten Banggai. Selain itu, belum dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian dalam penyusunan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Banggai;
- e. Peta proses bisnis sedang dalam proses penyesuaian dengan hasil dari penyederhanaan birokrasi dan kinerja utama organisasi;
- f. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah, serta berbagai macam aplikasi yang mendukung manajemen internal, administrasi pemerintahan maupun layanan kepada publik, namun masih banyak aplikasi yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi satu sama lain;
- g. Assessment baru dilakukan pada sebagian pegawai dan pengembangan kompetensi di sebagian PD belum didasarkan pada gap kompetensi. Selain itu, sistem merit belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari indeks sistem merit yang masih pada nilai 121,50 (buruk);

- h. Evaluasi kinerja organisasi telah menjadi dasar pemberian reward dan punishment bagi jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan evaluasi kinerja berkala (semesteran);
- i. Implementasi dan money terkait kebijakan di bidang pengawasan telah dilakukan pada sebagian PD, namun belum cukup optimal dan berdampak pada efektivitas sistem pengawasan. Selain itu, baru 1 (satu) unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai yang memperoleh predikat WBK yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Implementasi pelayanan publik khususnya di perangkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan, masih ada PD yang belum memiliki standar pelayanan, sistem kompensasi kepada penerima layanan jika layanan tidak sesuai dengan standar, inovasi yang berbasis permasalahan kebutuhan, survey kepuasan masyarakat secara berkala dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan organisasi.

Adapun terkait komponen hasil yang menunjukkan perolehan rincian nilai Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel. 3.60
Komponen Hasil Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	80,03	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	90,80	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	83,46	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	80,26	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, berikut ini beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Menetapkan Road Map RB Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 yang memuat arah dan sasaran yang akan diwujudkan beserta ukuran keberhasilannya yang mencakup 8 area perubahan serta menetapkan quick wins mandiri sebagai program percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banggai;
2. Menajamkan rencana aksi reformasi birokrasi dengan berfokus pada permasalahan/isu yang ada di organisasi dan mendorong fungsi tim reformasi birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi terutama pada perangkat daerah agar terjadi perbaikan secara berkelanjutan, sehingga dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dirasakan baik dalam peningkatan kinerja organisasi maupun pelayanan publik yang prima;
3. Mengoptimalisasikan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja dengan membuat rencana tindak agen perubahan yang terukur, sehingga perubahan yang dilakukan dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala;
4. Melakukan identifikasi dan menyusun peta keterkaitan terhadap seluruh kebijakan yang ada di Pemerintah Kabupaten Banggai dengan kebijakan lain yang terkait, baik kebijakan internal maupun eksternal, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan harmonisasi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian dalam penyusunan pemndang-undangan;
5. Melakukan identifikasi dan mereviu kembali peta proses bisnis dan SOP yang ada untuk memastikan agar seluruh peta proses bisnis dan SOP sesuai dengan kinerja utama organisasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi;
6. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Banggai dengan mengintegrasikan aplikasi yang sejenis/terkait sehingga mendorong pelaksanaan manajemen internal, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien;
7. Meningkatkan pengelolaan manajemen SDM, antara lain melakukan assessmant kepada seluruh pegawai dan pemetaan talenta sebagai dasar pengembangan karir dan penempatan jabatan kritikal/ suksesi, seLa penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai. Selain itu keselarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu masih perlu untuk disesuaikan lagi;
8. Mengoptimalkan implementasi kebijakan pengawasan yang ada di Pemerintah Kabupaten Banggai, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, SPIP,

pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan penanganan benturan kepentingan, dan WBS yang sudah berjalan agar lebih baik untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari penyimpangan dan risiko pencapaian tujuan organisasi. Selain itu perlu dilakukan penguatan pembangunan ZI di perangkat daerah agar semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di Pemerintah Kabupaten Banggai;

9. Memastikan implementasi pelayanan publik dengan menetapkan standar pelayanan pada setiap jenis layanan di PD, menerapkan budaya pelayanan prima, melakukan inovasi layanan sesuai dengan kebutuhan stakeholder, memberikan kompensasi kepada penerima layanan jika menerima layanan yang tidak sesuai standar pelayanan, melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala, dan menindaklanjuti hasil survei terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan;
10. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pembina indeks hasil antara untuk memperkuat komponen hasil antara yang masih kurang baik sehingga hasil indeks hasil antara Pemerintah Kabupaten Banggai semakin baik dan dapat mendukung pencapaian penilaian reformasi birokrasi secara optimal.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi terkait penetapan Road Map RB Kabupaten Banggai, di akhir tahun 2022 telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi dalam bentuk Peraturan Bupati Banggai tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2022-2026 yang memuat arah dan sasaran yang akan diwujudkan beserta ukuran keberhasilannya yang mencakup 8 area perubahan serta menetapkan quick wins mandiri sebagai program percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banggai.



Upaya untuk meningkatkan Indeks RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2022 dengan melaksanakan pembangunan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan cara melaksanakan pembinaan, pendampingan, sosialisasi dan evaluasi ke seluruh perangkat daerah, yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Banggai sebagai bentuk penguatan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah dilaksanakan validasi. Target akhir pada RPJMD Tahun 2022 untuk Indeks Inovasi Daerah yaitu predikat “Sangat Inovatif”, sedangkan realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2022 mendapatkan nilai 49,45 dengan predikat “Inovatif” berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11–6301.A Tahun 2022. Sehingga realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten banggai pada Tahun 2022 belum mencapai target sesuai dengan RPJMD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD 2026.

Adapun inovasi kabupaten banggai pada tahun 2022 terdapat 59 inovasi yang tersebar pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 050/1492/Bappelitbangda tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022.



<https://drive.google.com/drive/folders/13gyoHxS1VsouwkBTeZTdefK9UOZO26iC?usp=sharing>

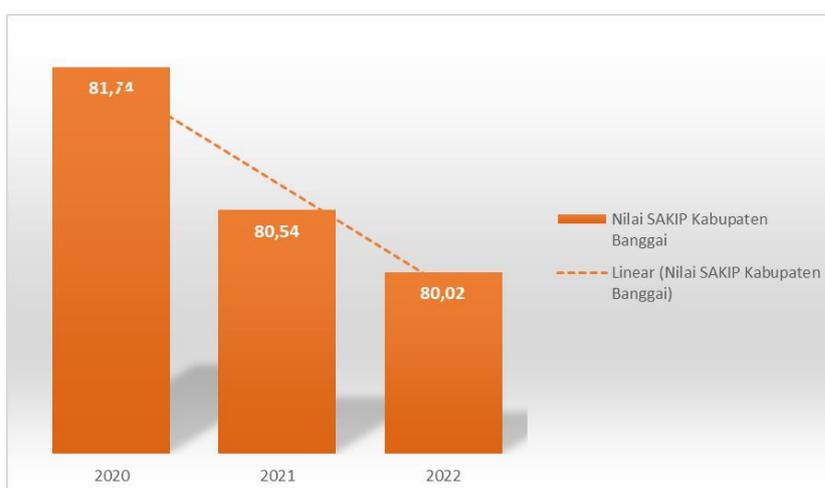
3. Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga harus dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan evaluasi pada tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi AKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Grafik 3.32
Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Banggai, 2019-2022



Kualitas SAKIP Kabupaten Banggai dari tahun 2020 sampai 2021 memperoleh kategori “A”. Untuk nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2022 ditargetkan dengan nilai “A”. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperoleh capaian realisasi untuk tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dimana Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan nilai 80,02 dengan predikat “A”. Sedangkan untuk tahun 2021 hasil evaluasi memperoleh nilai 80,54 dengan predikat “A” mengalami penurunan nilai sebesar 0,52 point dari tahun 2021.

Pada tahun 2021 terdapat rekomendasi yang diberikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus ditindak lanjuti pada oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Berikut ini merupakan upaya perbaikan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2022, yaitu:

- a. Budaya kinerja telah terbangun di Kabupaten Banggai, hal ini terlihat dari implementasi evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali terkait pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan di Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar pemberian reward dan punishment kepada seluruh Kepala PD.
- b. Di internal PD, dilakukan evaluasi internal mandiri secara berkala oleh Tim Sakip Perangkat Daerah secara triwulanan yang tidak hanya mencakup capaian kegiatan, program, dan anggaran saja, namun sampai ke kinerja (IKU).

Berikut ini merupakan rincian hasil evaluasi oleh KEMENPAN RB adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.61
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Banggai Tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,03
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,28
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,64
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,07
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber : Hasil Evaluasi AKIP oleh KemenPANRB Tahun 2022

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja

Penjenjangan/cascading kinerja pada level Pemda dan PD belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi

yang dihadapi. Adapun hubungan sebab akibat yang belum sepenuhnya sinkron ini dapat dilihat pada level PD khususnya penjenjangan dari level program, kegiatan dan sub kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Banggai dan perangkat daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan telah memiliki rencana aksinya untuk pencapaian kinerja. Hasil pengukuran kinerja organisasi secara berkala telah dijadikan dasar pemberian reward dan punishment bagi organisasi. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja secara berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan maupun pengajuan anggaran belum optimal;
2. Pemberian reward dan punishment bagi individu belum sepenuhnya memperhatikan keselarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu, dimana produktivitas kerja/capaian kinerja individu menjadi dasar pemberian TPP, selain disiplin kerja, namun perlu dilakukan pemantauan kesesuaian penilaian khususnya pada komponen capaian kinerja untuk memastikan adanya penghargaan yang berbeda bagi pegawai yang memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan kinerja level di atasnya hingga level organisasi (keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi).

c. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Banggai telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat Pemda maupun tingkat PD. Kualitas pelaporan kinerja di tingkat Pemda sudah cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelaporan kinerja di tingkat PD di antaranya sebagai berikut:

1. Laporan kinerja PD belum mengungkapkan analisis mendalam terkait pencapaian kinerja dan faktor-faktor pendukung dan penghambat ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, seperti pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKPSDM, BPKAD, dan sebagainya;
2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya masih belum menjelaskan terkait tingkat efisiensi sumber daya secara jelas, seperti pada BKPSDM, BPBD, Dinas Pariwisata, dan sebagainya;

3. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Inspektorat Kabupaten Banggai telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Hasil evaluasi telah dijadikan dasar pemberian reward dan punishment, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:
1. Belum menyusun pedoman evaluasi internal sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Laporan hasil evaluasi PD tahun 2021 telah menggambarkan catatan dan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan yang ada pada setiap PD, akan tetapi masih diperlukan peningkatan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi yang relevan untuk seluruh PD secara merata, khususnya pada kualitas dan pemanfaatan SAKIP di PD;
 3. Masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih menajamkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *oufpuf* dan *outcome* pada level pusat.

Berdasarkan uraian di atas, serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan rekomendasi terhadap Pemerintah Kabupaten Banggai, sebagai berikut:

- a. Melakukan *reviu* dan penyempurnaan pohon kinerja untuk memastikan kualitas penjenjangan/*cascading* kinerja dari level strategis sampai dengan operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja;
- b. Memastikan bahwa pemilihan program dan/atau kegiatan maupun anggaran telah mempertimbangkan pencapaian kinerja;
- c. Melakukan pemantauan atas kesesuaian penilaian kedisiplinan dan produktivitas kerja individu sebagai komponen pemberian *reward and punishment* dengan

menghubungkan antara kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi sesuai dengan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat PD dengan menyajikan analisis secara mendalam pencapaian kinerja, faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, dan menghitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja. Selanjutnya, mendorong kemanfaatan dari laporan kinerja sehingga dapat memberikan saran/masukan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
- e. Menyusun pedoman evaluasi internal sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Memastikan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi yang tertera dalam laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP tingkat PD khususnya kepada kualitas dan pemanfaatan SAKIP di PD;
- g. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama”, yaitu:

Tabel.3.62
Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.172.878.299.342,00	948.656.754.080,88	80,88
Pendaftaran Penduduk	693.757.100,00	547.093.530,00	78,86
Pencatatan Sipil	150.614.680,00	132.681.901,00	88,09
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	138.359.562,00	122.807.362,00	88,76
Pengelolaan Profil Kependudukan	109.895.259,00	100.344.759,00	91,31
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	298.697.050,00	289.511.850,00	96,92
Promosi Penanaman Modal	286.463.300,00	269.790.497,00	94,18
Pelayanan Penanaman Modal	153.332.330,00	132.103.470,00	86,16
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	568.945.000,00	345.769.200,00	60,77

Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	104.075.050,00	96.396.050,00	92,62
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	220.354.000,00	218.969.525,00	99,37
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	211.136.800,00	209.855.439,00	99,39
Pengelolaan Arsip	61.965.500,00	61.622.323,00	99,45
Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	103.887.855,00	103.467.412,00	99,60
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	31.004.640.142,00	29.870.788.064,00	96,34
Perekonomian Dan Pembangunan	5.106.616.900,00	4.827.382.821,00	94,53
Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	24.056.304.050,00	23.424.076.640,00	97,37
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.292.329.768,00	3.240.895.467,00	98,44
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.960.059.200,00	2.918.004.827,00	98,58
Pengelolaan Keuangan Daerah	388.643.799.209,00	136.732.974.991,00	35,18
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.762.109.403,00	2.394.323.592,00	86,68
Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.815.441.289,00	2.645.623.627,00	93,97
Kepegawaian Daerah	4.300.989.730,00	4.272.095.934,00	99,33
Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.138.999.810,00	1.134.267.149,00	99,58
Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.187.498.550,00	1.185.451.820,00	99,83
Penyelenggaraan Pengawasan	2.687.425.350,00	2.145.173.510,00	79,82
Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	175.501.550,00	135.166.870,00	77,02
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	699.594.360,00	564.315.860,00	80,66
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	503.376.635,00	502.281.886,00	99,78
Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	120.190.000,00	120.180.000,00	99,99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	737.139.900,00	713.344.000,00	96,77
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.573.500,00	33.493.500,00	99,76
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	402.997.700,00	376.578.100,00	93,44
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.614.988.590,00	1.313.592.781,00	81,34
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	198.354.242,00	162.746.850,00	82,05
Pembinaan Dan	224.814.650,00	219.835.550,00	97,79

Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	543.141.400,00	493.070.900,00	90,78
Jumlah	1.651.189.668.756,00	1.170.712.832.137,88	70,90

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 98,48% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.170.712.832.137,88 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.651.189.668.756,00 atau sebesar 70,90%.

Tabel 3.63
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	% Rata-Rata Capaian Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	102,60	353.917.352.027,00	224.805.377.721,00	63,52
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	Angka Kemiskinan				
	Gini Rasio				
Tingkat Efisiensi : 39,08 % Tingkat Efektifitas : 161,52 %					
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	117,57	7.687.226.966,00	6.189.332.441,00	80,51
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	107,25	24.055.086.566	23.257.231.657	96,68

Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	102,73	318.560.538.515,00	256.151.236.467,00	80,41
Tingkat Efisiensi : 22,32 %					
Tingkat Efektifitas : 127,76 %					
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	100,00	4.834.058.050,00	4.546.743.573,00	94,06
Tingkat Efisiensi : 5,94 %					
Tingkat Efektifitas : 106,31 %					
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB Indeks Ketahanan Pangan	109,85%	73.876.603.706,15	71.193.548.170,00	96,37
Tingkat Efisiensi : 13,15 %					
Tingkat Efektifitas : 113,65 %					
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	98,48	20.302.546.108,00	18.014.935.259,00	88,73
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	12,66	3.907.489.665,00	3.573.884.346,00	91,46
Meningkatnya Revolusi Mental dan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	47,89%	2.374.993.600,00	2.261.702.180,00	95,23

Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama					
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	Indeks Reformasi Birokrasi	83,33	1.651.189.668.756,00	1.170.712.832.137,88	70,90
	Indeks Inovasi Daerah				
	Nilai SAKIP				

3.4. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 2.504.758.902.107,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.218.447.199.135,88 atau mencapai 88,57%. Rincian pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

3.4.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah meliputi:

Tabel 3.64
Realisasi Pendapatan Daerah
Per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
PENDAPATAN	2.250.443.203.781,00	2.220.673.106.158,01	98,68
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.933.053.956,00	217.602.321.680,01	87,41
Pajak Daerah	93.210.422.000,00	62.489.182.198,96	67,04
Retribusi Daerah	21.014.983.686,00	14.325.178.092,00	68,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	3.962.201.302,68	152,39
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.107.648.270,00	136.825.760.086,37	103,57

PENDAPATAN TRANSFER	1.987.690.608.565,00	1.994.901.211.555,00	100,36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.909.635.339.013,00	1.916.630.429.684,00	100,37
Dana Perimbangan	1.671.397.119.013,00	1.666.629.154.684,00	99,71
Dana Transfer Khusus Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	805.938.719.000,00	805.156.499.125,00	99,90
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	122.888.338.000,00	88.010.883.388,00	71,62
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	206.033.223.000,00	171.373.659.562,00	83,18
Dana Insentif Daerah (DID)	17.313.409.000,00	29.076.464.000,00	167,94
Dana Desa	220.924.811.000,00	220.924.811.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.055.269.552,00	78.270.781.871,00	100,28
Pendapatan Bagi Hasil	67.235.269.552,00	67.450.781.871,00	100,32
Bantuan Keuangan	10.820.000.000,00	10.820.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.819.541.260,00	8.169.572.923,00	59,12
Pendapatan Hibah	13.819.541.260,00	8.169.572.923,00	59,12

Sumber : BPKAD Kab. Banggai, 2022

Berdasarkan rincian pendapatan daerah pada tabel 3.64 terlihat bahwa keseluruhan realisasi pendapatan diperoleh sebesar 98,68%, dan realisasi terbesar masih berada pada pendapatan transfer sebesar Rp. 1.994.901.211.555,00 atau 100,36% dari total pendapatan transfer Rp. 1.987.690.608.565,00 Kabupaten Banggai.

Berdasarkan rincian tersebut diatas dapat diuraikan menurut sumber pendapatan dengan penjabaran bahwa :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA 2022 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan kewenangannya berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp. 217.602.321.680,01 atau 87,41 % atau lebih kecil Rp. 31.330.732.275,99 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp.248.933.053.956,00 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banggai dianggarkan sebesar Rp 93.210.422.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 62.489.182.198,96 atau sebesar 67,04% dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 3.65
Pendapatan Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	3.915.500.000,00	1.958.465.378,02	50,02
2	Pajak Restoran	17.850.500.000,00	11.528.704.043,16	64,58
3	Pajak Hiburan	400.534.000,00	164.286.046,00	41,02
4	Pajak Reklame	1.751.770.000,00	987.669.700,50	56,38
5	Pajak Penerangan Jalan	32.490.000.000,00	23.564.142.419,00	72,53
6	Pajak Parkir	250.735.000,00	165.155.400,00	65,87
7	Pajak Air Tanah	4.574.500.000,00	2.726.938.644,00	59,61
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.956.964.000,00	7.795.561.538,28	55,85
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.300.279.000,00	9.176.795.062,00	74,61
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.719.640.000,00	4.149.758.418,00	77,30
Jumlah		93.210.422.000,00	62.489.182.198,96	67,04

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

Berdasarkan tabel 3.65 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di atas, dapat diketahui bahwa masing – masing jenis Pajak Daerah mencapai angka realisasi kurang dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 secara umum mencapai 67,04%. Sampai dengan akhir tahun 2022, realisasi Pajak Daerah mencapai angka

Rp. 62.489.182.198,96. Masalah/kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- Kurangnya kemampuan petugas pajak dalam menggali potensi pendapatan Pajak Daerah;
- Kurangnya jumlah personil pengelola Pajak Daerah;
- Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh petugas untuk menyadarkan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan;
- Lemahnya pengoperasian dan pengawasan teknologi informasi yang tersedia;

b. Faktor Eksternal

- Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku;
- Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap manfaat pajak untuk pembangunan daerah;
- Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya sehingga banyak Wajib Pajak yang bersikap abai terhadap kewajiban perpajakan dan cenderung menghindarinya;

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Penerimaan Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2022 sebesar Rp. 14.325.178.092,00 atau 68,17% dari pagu perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 21.014.983.686,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel. 3.66
Pendapatan Retribusi Daerah

No	Jenis Pajak	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	10.138.005.200,00	7.148.549.773,00	70,51
2.	Retribusi Jasa Usaha	6.210.276.290,00	4.260.779.440,00	68,61

3.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.666.702.196,00	2.915.848.879,00	62,48
Jumlah		21.014.983.686,00	14.325.178.092,00	68,17

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

Berdasarkan tabel 3.66 di atas diketahui bahwa retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp. 21.014.983.686,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.325.178.092,00 atau 68,17% yang berarti kurang dari angka yang ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 mencapai angka persentase yang bervariasi, mulai dari persentase terendah 62,48% hingga mencapai 70,51% (kurang dari target).

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi realisasi Retribusi Daerah tersebut, yaitu :

- a. Penggalian potensi Retribusi Daerah belum optimal;
 - b. Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan retribusi daerah;
 - c. Sistem pengelolaan Retribusi Daerah yang diterapkan oleh OPD terkait belum memadai sehingga masih banyak potensi yang tidak tertagih;
 - d. Banyaknya wajib retribusi yang belum patuh terhadap kewajibannya;
 - e. Belum optimalnya penerapan regulasi yang ada berkaitan dengan pemberian sanksi tegas terhadap Wajib Retribusi yang tidak patuh.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 3.67
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022

No.	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.600.000.000,00	3.962.201.302,68	152,39

Sumber : BPKAD Kab. Banggai

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 adalah Rp 3.962.201.302,68,00 atau 152,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.600.000.000,00. Realisasi tersebut telah mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan..

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada TA 2022, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp132.107.648.270,00 dengan realisasi sebesar Rp. 136.825.760.086,37 atau sebesar 103,57%.

Tabel. 3.68
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	1.180.105.947,00	107,28
2	Penerimaan Jasa Giro	6.000.000.000,00	5.068.000.881,31	84,47
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	195.273.959,00	39,05
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	2.690.423.384,07	107,62
5	Pendapatan dari Pengembalian	934.661.917,00	3.952.325.626,00	422,86
6	Pendapatan BLUD	96.228.104.165,00	106.535.255.956,99	110,71
7	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	24.844.882.188,00	17.204.305.154,00	69,25
Jumlah		132.107.648.270,00	136.825.690.908,37	103,57

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

Berikut ini rincian atas pendapatan dana kapitasi.

Tabel. 3.69
Pendapatan Dana Kapitasi

No	Uraian (FKTP)	Pendapatan 2021 (Rp)	Pendapatan 2022 (Rp)
1	Puskesmas Bunta	569.137.700,00	790.018.003,00
2	Puskesmas Balantak	306.678.600,00	266.209.782,00
3	Puskesmas Toili Iii	1.282.946.200,00	1.154.881.267,00
4	Puskesmas Pagimana	786.579.875,00	555.294.375,00
5	Puskesmas Toili I	900.810.600,00	931.925.317,00
6	Puskesmas Kintom	391.483.350,00	502.323.319,00
7	Puskesmas Tikupon	188.722.200,00	133.665.620,00
8	Puskesmas Kampung Baru	1.686.233.100,00	2.021.663.452,00
9	Puskesmas Toima	194.108.700,00	189.859.268,00
10	Puskesmas Simpang Raya	415.567.875,00	591.657.833,00
11	Puskesmas Nuhon	373.240.400,00	412.917.425,00
12	Puskesmas Lobu	162.520.200,00	178.985.124,00
13	Puskesmas Bonebobakal	267.528.877,00	277.485.811,00

14	Puskesmas Toili li	1.577.555.700,00	1.830.902.193,00
15	Puskesmas Balantak Selatan	194.083.200,00	147.012.362,00
16	Puskesmas Teku	198.373.200,00	237.348.323,00
17	Puskesmas Saiti	381.080.350,00	441.774.290,00
18	Puskesmas Batui	687.445.500,00	874.555.764,00
19	Puskesmas Hunduhon	572.094.425,00	556.634.128,00
20	Puskesmas Sinorang	611.582.050,00	623.691.370,00
21	Puskesmas Biak	448.268.800,00	716.061.092,00
22	Puskesmas Nambo	335.221.800,00	275.563.230,00
23	Rs.Pratama Pagimana	367.729.200,00	350.290.200,00
24	Puskesmas Mantok	248.778.675,00	327.286.325,00
25	Puskesmas Tangeban	568.133.400,00	596.006.282,00
26	Puskesmas Bualemo	507.590.625,00	692.877.990,00
27	Puskesmas Luwuk	1.443.634.200,00	1.527.415.009,00
Jumlah		15.667.128.802,00	17.204.305.154,00

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

Pada tabel 3.69 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dana kapitasi TA 2022 dari jumlah 27 (dua puluh tujuh) FKTP terealisasi sebesar Rp. 17.204.305.154,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.237.176.352,00 dibandingkan dengan pendapatan dana kapitasi TA 2021.

b. Pendapatan Transfer

Dana Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, transfer dari Pemerintah Provinsi, serta bantuan keuangan. Pada TA 2022 Dana Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Kas Daerah sebesar Rp. 1.994.901.211.555,00 atau 100,36% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.987.690.608.565,00 Berikut ini merupakan rincian dari pendapatan transfer.

Tabel. 3.70
Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.909.635.339.013,00	1.916.630.429.684,00	100,37
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.055.269.552,00	78.270.781.871,00	100,28
Jumlah		1.987.690.608.565,00	1.994.901.211.555,00	100,36

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan mencapai sebesar Rp. 1.916.630.429.684,00 atau 100,37% kurang dari anggaran

setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.909.635.339.013,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 3.71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dana Perimbangan	1.671.397.119.013,00	1.666.629.154.684,00	99,71
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	805.938.719.000,00	805.156.499.125,00	99,90
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	122.888.338.000,00	88.010.883.388,00	71,62
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	206.033.223.000,00	171.373.659.562,00	83,18
5	Dana Insentif Daerah (DID)	17.313.409.000,00	29.076.464.000,00	167,94
6	Dana Desa	220.924.811.000,00	220.924.811.000,00	100,00
Jumlah		1.909.635.339.013,00	1.916.630.429.684,00	100,37

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp. 13.819.541.260,00 terealisasi sebesar Rp. 8.169.572.923,00 atau 59,12%.

3.4.2. Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2022

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Secara ideal Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun komponen Belanja Daerah meliputi:

Tabel 3.72
Realisasi Belanja Daerah
Per 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
BELANJA	2.504.758.902.107,00	2.218.447.199.135,88	88,57
BELANJA OPERASI	1.756.654.145.609,00	1.568.604.480.785,88	89,30
Belanja Pegawai	880.152.059.636,00	773.187.852.134,00	87,85
Belanja Barang dan Jasa	811.904.495.927,00	745.317.887.188,88	91,80
Belanja Subsidi	404.000.000,00	403.800.000,00	99,95
Belanja Hibah	55.004.780.046,00	41.250.276.463,00	74,99
Belanja Bantuan Sosial	9.188.810.000,00	8.444.665.000,00	91,90
BELANJA MODAL	364.790.554.634,00	296.228.691.146,00	81,21
Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.967.093.116,00	64.116.334.154,00	85,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.139.787.757,00	78.854.508.591,00	61,54
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	159.511.673.761,00	152.509.584.401,00	95,61
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.872.000.000,00	748.264.000,00	39,97
BELANJA TIDAK TERDUGA	31.390.525.360,00	1.690.350.700,00	5,38
Belanja Tidak Terduga	31.390.525.360,00	1.690.350.700,00	5,38
BELANJA TRANSFER	351.923.676.504,00	351.923.676.504,00	100,00
BELANJA BAGI HASIL	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00	100,00
Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00	100,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	-254.315.698.326,00	2.225.907.022,13	10,11

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2022 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Dari tabel 3.64 tersebut bahwa belanja kabupaten banggai dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial. Realisasi belanja operasi mencapai sebesar Rp. 1.568.604.480.785,88 atau efisiensi sebesar Rp. 188.049.664.823,12 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.756.654.145.609,00.

Komponen belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 773.187.852.134,00 atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 106.964.207.502,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 880.152.059.636,00 atau 87,85%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.73
Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	537.500.583.081,00	488.763.169.237,00	90,93
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	178.132.986.625,00	153.233.271.085,00	86,02
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	134.699.604.541,00	110.583.103.157,00	82,10
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.082.252.058,00	18.674.865.800,00	68,96
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	876.924.831,00	274.471.855,00	31,30
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	952.800.000,00	866.000.000,00	90,89
7	Belanja Pegawai BLUD	906.908.500,00	792.971.000,00	87,44
Jumlah		880.152.059.636,00	773.187.852.134,00	87,85

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 811.904.495.927,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 745.317.887.188,88 atau 91,80%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.74
Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Barang	197.712.069.715,00	162.195.251.288,00	82,04
2	Belanja Jasa	268.040.590.062,00	238.844.219.030,00	89,11
3	Belanja Pemeliharaan	63.543.430.474,00	61.501.720.300,88	96,79
4	Belanja Perjalanan Dinas	130.723.133.273,00	116.335.723.649,00	88,99
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.536.125.000,00	10.389612.000,00	98,61
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.738.883.630,00	47.764.685.238,00	106,76
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	96.610.263.773,00	108.286.675.683,00	112,09
Jumlah		811.904.495.927,00	745.317.887.188,88	91,80

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum, Belanja Subsidi Terealisasi Sebesar Rp. 403.800.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 404.000.000,00 atau 99,95%.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 41.250.276.463,00 atau 74,99% dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 55.004.780.046,00.

Berikut ini adalah rincian Belanja Hibah TA. 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.75
Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.950.015.392,00	3.649.961.600,00	92,40
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	46.432.968.514,00	36.841.725.832,00	79,34
3	Belanja Hibah Dana BOS	3.863.140.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	758.656.140,00	758.589.031,00	99,99
Jumlah		55.004.780.046,00	41.250.276.463,00	74,99

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan social dilakukan setelah memprioritaskan penemuan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan sosial berupa uang kepada individu atau keluarga terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Banggai dianggarkan selama TA 2022 sebesar Rp. 9.188.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.444.665.000,00 atau 91,90%.

b) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan asset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahane seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 296.228.691.146,00 atau efisiensi sebesar Rp. 68.561.863.488,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 364.790.554.634,00 Belanja Modal menyerap dana sebesar 81,21 % dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan setelah perubahan.

c) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk keperluan penanganan bencana alam dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Belanja Tidak Terduga untuk tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 31.390.525.360,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 1.690.350.700,00 atau 5,38%.

3.4.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai meliputi:

Tabel 3.76
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	257.315.698.326,00	256.312.081.265,54	99,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	256.315.698.326,00	256.312.051.265,65	100,00
Penghematan Belanja	256.315.698.326,00	256.315.668.326,00	100,00
Sisa Belanja Lainnya	256.315.698.326,00	256.315.668.326,00	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	66,67
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	254.315.698.326,00	254.312.081.265,54	
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	256.537.988.287,67	

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2022

Berdasarkan tabel diatas pembiayaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pembiayaan, penjualan obligasi

pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- b. Penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah selama ini baru terbatas pada penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran tahun berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan atau potensi pendapatan yang direncanakan sulit untuk dinaikan.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok-pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
- b. Selama tahun anggaran 2022 pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dan dibelanjakan setiap tahunnya, Alokasi anggaran Pengeluaran pembiayaan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya penyertaan modal investasi daerah dan pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, serta Pemberian Pinjaman daerah kepada masyarakat.
- c. Realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,00,00 atau 66,67% dari target anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

3) Realisasi Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai yang perlu dibayarkan kembali. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai sebesar Rp. 256.312.081.265,54 atau 99,61% dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 257.315.698.326,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 namun terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 diperuntukkan sebagai 66,67%



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Banggai, maka dalam pelaporan kinerja tahun 2022 merupakan masa pelaporan tahun pertama pada periode kepemimpinan Kepala Daerah periode 2021-2026. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 6 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja lebih dari 100% bermakna Sangat Baik, 8 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja >75%-100% bermakna Baik, 1 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja 55%-75% bermakna Cukup, dan 2 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja <55% bermakna Kurang. Meskipun terdapat beberapa indikator masih belum berhasil, namun secara umum target indikator kinerja pada Tahun 2022 dikategorikan cukup berhasil dengan nilai capaian rata-ratanya yaitu sebesar 94,63% dari 15 indikator, 1 indikator dengan capaian tinggi dan 1 indikator dengan capaian inovatif.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian target sasaran kinerja di masa yang akan datang, maka dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan penajaman progam-program dan kegiatan yang mengarah pada pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD agar pelaksanaan program/kegiatan efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan khususnya diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil dengan menyediakan pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka memenuhi target;

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap indikator pada Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Banggai.

Luwuk Maret 2023
BUPATI BANGGAI
If. H. Amirudin, MM



LAMPIRAN



PENGHARGAAN UNTUK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022

1. *PENGHARGAAN OPINI WTP 10 KALI BERTURUT-TURUT UNTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEJAK TAHUN 2012-2021*
2. *MEMPERTAHANKAN NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DENGAN PREDIKAT "A" DAN NILAI REFORMASI BIROKRASI PREDIKAT "B" TAHUN 2022*
3. *PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERBAIK KE 1 TINGKAT PROVINSI SULTENG TAHUN 2022*
4. *NOMINASI 10 BESAR KABUPATEN TERBAIK PPD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022*
5. *PERSEMBAHAN SERTIFIKAT MURI "PEMBENTANGAN BENDERA TERPANJANG DI BAWAH LAUT" DARI FREEDIVE DAN SCUBA DIVER*
6. *PENGHARGAAN KABUPATEN WILAYAH SULAWESI SEBAGAI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHUN 2022.*
7. *PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (KEMENKUMHAM) REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KABUPATEN PEDULI HAM TAHUN 2022.*
8. *PENGHARGAAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 DARI OMBUDSMAN RI : TERBAIK DI SULTENG*



PEMKAB BANGGAI RAIH PENGHARGAAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 DARI OMBUDSMAN RI : TERBAIK DI SULTENG

